PEMERINTAH
KABUPATEN GRESIK

TKPK
Kabupaten Gresik

LAPORAN PELAKSANAAN
PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH
TAHUN 2024

2025

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
PENELITIAN dan PENGEMBANGAN DAERAH

PEMERINTAH
KABUPATEN GRESIK

TKPK
Kabupaten Gresik

LAPORAN PELAKSANAAN
PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH
TAHUN 2024

2025

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
PENELITIAN dan PENGEMBANGAN DAERAH

Pemerintah
Kabupaten Gresik

Judul: **LAPORAN PELAKSANAAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH KABUPATEN GRESIK - TAHUN 2024**

Badan Perencanaan Pembangunan
Penelitian dan Pengembangan Daerah
Kabupaten Gresik

2025

Kata Pengantar

Pemerintah
Kabupaten Gresik

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat *Allah* SWT, atas hidayah-Nya sehingga pada tahun ini dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) Kabupaten Gresik Tahun 2024.

Kemiskinan merupakan tantangan pembangunan yang terdapat di negara berkembang termasuk Indonesia. Tantangan ini membuat pemerintah berkepentingan untuk lebih serius memformulasikan kebijakan yang utuh dalam penanggulangan kemiskinan. Pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Gresik telah dirumuskan pondasi kebijakan yang secara eksplisit bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin dan sekaligus memberikan kontribusi dalam mengurangi jumlah penduduk miskin nasional. Untuk mewujudkan target-target yang tercantum dalam RPJMD, maka diperlukan pendekatan baru yang mampu mengakselerasi proses peningkatan capaian. Strategi mewujudkan percepatan tersebut ditempuh melalui dua cara yaitu peningkatan efektifitas program dan kelembagaan koordinasi penanggulangan kemiskinan.

Sebagai wujud pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten Gresik dalam pelaksanaan penanggulangan kemiskinan, setiap tahun menyusun Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) untuk disampaikan kepada Bupati Gresik dan Gubernur Provinsi Jawa Timur. Dokumen ini memberikan data dan fakta bagaimana strategi yang dibangun dalam penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Gresik. Dari data yang disampaikan,

diharapkan tergambar capaian positif sekaligus kekurangan berbagai program yang telah dilakukan terhadap perkembangan beberapa indikator utama kemiskinan.

Sebagai sebuah kerja sistem, kita tentu memahami bahwa penanggulangan kemiskinan membutuhkan kebersamaan, sinergi lintas sektor, dan lintas pemangku kepentingan. Kita mengapresiasi peran sinergis swasta yang telah berkontribusi dalam program sosialnya. Pada saat yang sama, kita harapkan agar masyarakat semakin mampu menggalang modal sosialnya seperti solidaritas, kepercayaan dan gotong royong untuk mendorong lebih banyak masyarakat menikmati kesejahteraan.

Ucapan terima kasih atas kerjasama semua pihak dalam mewujudkan prestasi bersama yang telah dicapai sejauh ini. Namun kami percaya, bahwa kita tidak cepat berpuas diri. Capaian di Tahun 2024 ini akan menjadi pendorong kita untuk mewujudkan kinerja yang lebih baik lagi di tahun-tahun yang akan datang.

Akhirnya, semoga *Allah* SWT senantiasa memberikan hidayah dan meridloi segala upaya kita bersama dalam mewujudkan gerakan bersama Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Gresik, Aamiin.

Gresik, 19 Mei 2025

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan
Penelitian dan Pengembangan Daerah
Selaku
Sekretaris TKPK Kabupaten Gresik

Ringkasan Eksekutif

Persentase penduduk miskin di Kabupaten Gresik pada Maret 2024 berada pada angka 10,32 persen, kondisi ini mengalami penurunan sebesar 0,64 persen poin bila dibandingkan dengan kondisi Maret 2023. Capaian ini masih lebih tinggi terhadap capaian di tingkat Provinsi Jawa Timur yang sebesar 9,79 persen maupun capaian Nasional yang tercatat sebesar 9,03 persen. Turunnya persentase penduduk miskin di Kabupaten Gresik pada tahun 2024 diikuti dengan turunnya nilai indeks kedalaman kemiskinan dan nilai indeks kedalaman kemiskinan. Pada Maret 2024, indeks kedalaman kemiskinan turun menjadi 1,58 persen dari semula sebesar 1,63 persen di Maret 2023, sedangkan indeks keparahan kemiskinan turun menjadi 0,33 persen dari semula sebesar 0,38 persen di Maret 2023. Kondisi ini memberikan gambaran bahwa program-program penanggulangan kemiskinan di tahun 2023, baik program nasional dan daerah yang dilaksanakan oleh Pemerintah beserta stakeholder di Kabupaten Gresik, selain mampu menurunkan persentase penduduk miskin juga mampu memperpendek kesenjangan pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan, dan memperkecil kesenjangan pengeluaran antar penduduk miskin.

Jika merujuk pada RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026, maka capaian persentase penduduk miskin Kabupaten Gresik untuk Tahun 2024 hampir mencapai target RPJMD, yang menetapkan target pada Tahun 2024 berada pada angka 10,00-9,70 persen.

Pada saat yang sama, indikator Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) telah menunjukkan capaian yang lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya, dimana pada Tahun 2024 TPT Kabupaten Gresik berada pada angka 6,45 persen, turun dibanding capaian tahun 2023 yang tercatat sebesar 6,82 persen. Capaian TPT Kabupaten Gresik Tahun 2024 masih lebih tinggi terhadap rata-rata capaian di tingkat Provinsi Jawa Timur yang sebesar 4,88 persen maupun capaian Nasional yang berada pada angka 4,91 persen.

Capaian TPT tahun 2024 telah lebih baik/turun dibandingkan tahun 2023, dan selama lima tahun terakhir (tahun 2020-2024) sudah menunjukkan pola perkembangan dengan kecenderungan *trend* menurun.

Untuk dimensi pendidikan, dari 9 (sembilan) indikator, terdapat 4 (empat) indikator di tahun 2024 ini yang menunjukkan capaian kinerja yang lebih buruk dari tahun sebelumnya, yaitu indikator APM SD/MI, APM SMA/SMK/MA, APtS usia 13-15 tahun dan indikator Angka Melek Huruf Penduduk Usia 15^{+}. Sementara itu dari hasil simulasi data deret waktu (*trend line*) pada 5 tahun terakhir (tahun 2020-2024), indikator APM SD/MI, dan indikator APM SMA/SMK/MA menunjukkan pola perkembangan dengan kecenderungan *trend* yang menurun (memburuk). Dengan demikian indikator-indikatror ini perlu mendapat perhatian perbaikan di tahun depan.

Sementara itu untuk indikator yang lain pada dimensi pendidikan ini telah menunjukkan cipaian kinerja yang membaik sekaligus menampilkan pola perkembangan antar waktu dengan kecenderungan membaik pula.

Pada dimensi kesehatan, analisis pada 11 (sebelas) indikator, 2 (dua) indikator yaitu indikator Prevalensi Balita Gizi Buruk, Prevalensi Balita Gizi Kurang, dan indikator Persalinan di Fasilitas Kesehatan menunjukkan capaian kinerja yang tidak lebih baik dari tahun sebelumnya. Sedangkan indikator lainnya menunjukkan capaian kinerja yang lebih baik dari tahun sebelumnya.

Dari hasil simulasi data deret waktu (*trend line*) dalam 5 tahun terakhir (tahun 2020-2024), indikator-indikator ini menunjukkan pola perkembangan dengan kecenderungan *trend* membaik kecuali pada Prevalensi Balita Gizi Buruk, Prevalensi Balita Gizi Kurang, dan indikator Persalinan di Fasilitas Kesehatan.

Untuk isu infrastruktur dasar rumah tangga, dari 5 (lima) indikator utama yang di analisis, indikator Rumah Tangga dengan Sanitasi Layak dan indikator Rumah Tangga dengan Luas Bangunan 8m^2 per kapita atau lebih menunjukkan capaian kinerja tahun 2024 tidak lebih baik dari tahun sebelumnya. Sedangkan pada analisis berdasarkan deret waktu selama kurun waktu 5 tahun terakhir, hampir semua indikator telah menampilkan perkembangan antar waktu dengan kecenderungan *trend* yang semakin membaik, kecuali pada indikator RTLH, meski menunjukkan capaian tahun 2024 lebih baik dqari tahun sebelumnya tetapi perkembangan antar waktunya masih menampilkan *trend* perkembangan yang semakin memburuk.

Terhadap isu ketahanan pangan, indikator PoU menunjukkan capaian kinerja yang lebih baik dari tahun sebelumnya, sedangkan indikator Produktivitas Padi menunjukkan capaian kinerja tidak lebih baik dari tahun sebelumnya. Adapun pada perkembangan antar waktu, kedua indikator menampilkan pola perkembangan dengan kecenderungan *trend* membaik.

Sementara itu pada indikator rata-rata harga kebutuhan pokok utama, hampir semua rata-rata harga kebutuhan pokok utama menunjukkan kecenderungan peningkatan harga rata-rata.

Pada tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Gresik merealisasikan anggaran penanggulangan kemiskinan sebesar Rp 449.333.540.132,- yang dilaksanakan oleh 33 Perangkat Daerah (termasuk 12 Kecamatan) terdiri dari 50 program, 62 kegiatan, dan 110 sub kegiatan baik yang bersifat langsung, tidak langsung, maupun pendukung penanggulangan kemiskinan.

Perkembangan kelembagaan koordinasi penanggulangan kemiskinan (TKPK) Kabupaten Gresik pada Tahun 2024 semakin baik. Struktur organisasi TKPK telah disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2020. Dan sesuai Permendagri tersebut, fungsi dan peran TKPK terus ditingkatkan.

Isu penguatan kapasitas sumberdaya manusia, baik sumberdaya manusia di TKPK, maupun sumberdaya manusia di tingkat OPD pelaksana program penanggulangan kemiskinan di tahun 2024 telah dilakukan melalui serangkaian rapat koordinasi untuk menyamakan persepsi penanggulangan kemiskinan.

Paradigma baru tentang percepatan penanggulangan kemiskinan menekankan keterpaduan, mensyaratkan kesamaan cara pandang terhadap pentingnya koordinasi dari para pelaksana kegiatan secara optimal. Oleh karenanya, masih dipandang perlu untuk lebih meningkatkan kualitas dan kuantitas dari kegiatan penguatan kapasitas yang selama ini telah berjalan.

Penyusunan laporan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan ini merupakan salah satu upaya untuk secara bersama-sama menanggulangi masalah kemiskinan. Komitmen yang kuat dan langkah nyata dari seluruh pelaku pembangunan sangat diperlukan dalam upaya penanggulangan kemiskinan sehingga penanggulangan kemiskinan dapat menjadi arus utama dari seluruh kebijakan daerah.

Daftar Isi

Halaman:

Halaman Judul i
Kata Pengantar ii
Ringkasan Eksekutif iv
Daftar Isi ix
Daftar Gambar xi
Daftar Tabel xiii
Daftar Singkatan xiv

Bab I Pendahuluan 1
1.1. Latar Belakang 1
1.2. Maksud, Tujuan dan Manfaat 4
1.3. Landasan Hukum 5
1.4. Sistematika Penulisan 7

Bab II Gambaran Umum Daerah 8
2.1. Geografi dan Topografi 8
2.2. Administrasi Wilayah 10
2.3. Penduduk dan Ketenagakerjaan 12
2.4. Ekonomi Daerah 16

Bab III Kelembagaan Penanggulangan Kemiskinan 23
3.1. Kelembagaan dan Sumberdaya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) 23
3.2. Pelaksanaan Agenda kerja TKPK 31

3.3. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penanggulangan Kemiskinan 34
3.4. Penanganan Pengaduan Masyarakat 36
3.5. Hambatan dan Tantangan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan 36

Bab IV Capaian Kinerja dan Program Penanggulangan Kemiskinan ... 38
4.1. Program Penanggulangan Kemiskinan 37
4.2. Capaian Indikator Makro Penanggulangan Kemiskinan 67
4.3. Capaian Indikator Tahunan Terkait Isu Kemiskinan 77

Bab V Penutup 88
5.1. Kesimpulan 88
5.2. Rekomendasi 92

Daftar Pustaka

Lampiran-Lampiran

❑❑❑

Daftar Gambar

Halaman:

Gambar 2.1. Peta Wilayah Administratif Kabupaten Gresik 11

Gambar 2.2. Perkembangan Jumlah Penduduk Kabupaten Gresik 12

Gambar 2.3. Persentase Penduduk Kabupaten Gresik berdasar Sebaran Kelompok Usia Produktif, Tahun 2024 14

Gambar 2.4. Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Gresik Tahun 2020-2024 20

Gambar 3.1. Struktur Organisasi TKPK (Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan) 24

Gambar 4.1. Perkembangan Garis Kemiskinan Kabupaten Gresik 67

Gambar 4.2. Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin Kab. Gresik 69

Gambar 4.3. Perkembangan Persentase Penduduk Miskin Kab. Gresik .. 70

Gambar 4.4. Posisi Relatif Persentase Penduduk Miskin Kab. Gresik terhadap Provinsi Jawa Timur dan Nasional, Tahun 2024 ... 70

Gambar 4.5. Perkembangan Indeks Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Gresik 72

Gambar 4.6. Posisi Relatif Indeks Kedalaman Kemiskinan Kab. Gresik terhadap Provinsi Jawa Timur dan Nasional, Tahun 2024 ... 72

Gambar 4.7. Perkembangan Indeks Keparahan Kemiskinan Kabupaten Gresik 73

Gambar 4.8. Posisi Relatif Indeks Keparahan Kabupaten Gresik terhadap Provinsi Jawa Timur dan Nasional, Tahun 2024 74

Gambar 4.9. Perkembangan Angka Kemiskinan Ekstrem Kabupaten Gresik terhadap Provinsi dan Nasional 75

Gambar 5.1. Prioritas Wilayah Intervensi terhadap Individu Ekstrem Desil 1-4 Usia 15-59 tahun Tidak Bekerja 94

❑❑❑

Daftar Tabel

Halaman:

Tabel 2.1. Pembagian Wilayah Administrasi dan Luas Wilayah 10

Tabel 2.2. Jumlah dan Kepadatan Penduduk menurut Kecamatan,Tahun 2023 dan 2024 13

Tabel 2.3. Perkembangan Indikator Ketenagakerjaan Kabupaten Gresik Tahun 2022-2024 16

Tabel 2.4. Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Gresik Tahun 2020-2024 17

Tabel 2.5. Perkembangan PDRB dan PDRB per Kapita Kabupaten Gresik Tahun 2020-2024 22

Tabel 3.1. Pelaksanaan Agenda Kerja TKPK Kabupaten Gresik 32

Tabel 4.1. Program Penanggulangan Kemiskinan Nasional dan Provinsi Jawa Timur 40

Tabel 4.2. Program Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Gresik, Tahun Anggaran 2024 (sumber dana APBD TA 2024) 44

Tabel 4.3. Perkembangan Capaian P0, P1, P2, dan Kemiskinan Ekstrem Kabupaten Gresik 76

Tabel 4.4. Capaian Kinerja Tahunan terkait Isu Kemiskinan Kabupaten Gresik terhadap Provinsi dan Nasional, Tahun 2024 78

Tabel 4.5. Perkembangan Kinerja Antar Waktu Tahunan terkait Isu Kemiskinan Kabupaten Gresik (Kemiskinan Multi Dimensi), Tahun 2020-2024 82

Tabel 5.1. Indikator-Indikator Tahunan terkait Isu Kemiskinan dengan Capaian Kinerja yang Perlu Perhatian/Perrbaikan 90

❑❑❑

Daftar Singkatan

AKB	: Angka Kematian Bayi
AKBa	: Angka Kematian Balita
AKI	: Angka Kematian Ibu
AKI	: Angka Kematian Neonatal
AMH	: Angka Melek Huruf
APBD	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
APBN	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional
APM	: Angka Partisipasi Murni
APtS	: Angka Putus Sekolah
ARP	: Angka Rawan Pangan
BLT	: Bantuan Langsung Tunai
Bappeda	: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Bappenas	: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
BPNT	: Bantuan Pangan Non Tunai
BPS	: Badan Pusat Statistik
CSR	: *Corporate Social Responsibility*
DAK	: Dana Alokasi Khusus
DAMISDA	: Data Mandiri Kemiskinan Daerah
DTKS	: Data Terpadu Kesejahteraan Sosial
FGD	: *Focus Group Discussion*
HLS	: Harapan Lama Sekolah
Inpres	: Instruksi Presiden
KPM	: Kelompok Penerima Manfaat

LP2KD	: Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah
MI	: Madrasah Ibtidaiyah
MTs	: Madrasah Tsanawiyah
OPD	: Organisasi Perangkat Daerah
P3KE	: Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem
PBI	: Penerima Bantuan Iuran
PDB	: Produk Domestik Bruto
PDRB	: Produk Domestik Regional Bruto
Permen	: Peraturan Menteri
PoU	: *Prevalence of Undernourishment*
PP	: Peraturan Pemerintah
RAT	: Rencana Aksi Tahunan
RKPD	: Rencana Kerja Pemerintah Daerah
RLS	: Rata-rata Lama Sekolah
RPJMD	: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
RPJMN	: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
RPKD	: Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah
Ruta	: Rumah Tangga
SD	: Sekolah Dasar
SDGs	: *Sustainable Development Goals*
SMP	: Sekolah Menengah Pertama
TPAK	: Tingkat Pertisipasi Angkatan Kerja
TPB	: Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
TKPK	: Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan
TNP2K	: Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan
TPT	: Tingkat Pengangguran Terbuka

❑❑❑

PEMERINTAH
KABUPATEN GRESIK

TKPK
Kabupaten Gresik

Bab 1
Pendahuluan

LP2KD
2024

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
PENELITIAN dan PENGEMBANGAN DAERAH

1 BAB Pendahuluan

1.1. Latar Belakang.

Kemiskinan (*poverty*) merupakan permasalahan fundamental yang sejak berabad-abad lalu hingga saat ini masih dihadapi oleh bangsa-bangsa di dunia, termasuk juga di Indonesia. Oleh karena itu permasalahan kemiskinan harus segera ditangani melalui implementasi langkah-langkah penanggulangan dengan pendekatan yang lebih terarah, sistematis, dan masif. Penanggulangan kemiskinan diarahkan untuk mengurangi beban rakyat miskin dan memenuhi hak-hak dasar warga negara secara layak melalui pembangunan inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan untuk mewujudkan kehidupan yang bermartabat.

Penanggulangan kemiskinan sebagai agenda global sebagaimana tertuang dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs), maka kebijakan pembangunan di Indonesia baik pusat maupun daerah diprioritaskan untuk program-program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan. Bentuk komitmen Pemerintah terhadap penduduk miskin berupa program-program penanggulangan kemiskinan telah menjadi bagian dari rencana

pembangunan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah, baik melalui Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) maupun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM).

Sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dinyatakan bahwa: "Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah mempunyai kewajiban meningkatkan kesejahteraan rakyat". Hal ini secara implisit berarti penanggulangan kemiskinan harus diupayakan demi tercapainya kesejahteraan rakyat. Hasil pembangunan hendaknya dapat dinikmati secara lebih merata dan adil bagi seluruh lapisan masyarakat sebagai wujud peningkatan kesejahteraan lahir dan batin.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik yang di rilis melalui Berita Resmi Statistik No. 50/07/Th. XXVII, 1 Juli 2024, persentase penduduk miskin di Indonesia pada Maret 2024 sebesar 9,03 persen, turun sebesar 0,33 persen poin terhadap Maret 2023 dan menurun 0,54 persen poin terhadap September 2023.

Seluruh Provinsi di Indonesia pada Maret 2024 mengalami penurunan persentase penduduk miskin terhadap Maret 2023, Provinsi Jawa Timur merupakan salah satu salah satu provinsi yang mengalami penurunan persentase penduduk miskin dari 10,35 (Maret 2023) menjadi 9,79 (Maret 2024).

Sementara itu persentase penduduk miskin di seluruh Kabupaten/ Kota di Provinsi Jawa Timur pada Maret 2024 mengalami penurunan terhadap Maret 2023, termasuk Kabupaten Gresik yang pada Maret 2024 persentase penduduk miskinnya tercatat sebesar 10,32, turun 0,64 persen poin terhadap Maret 2023.

Di sisi lain, pada tahun 2020, Pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia telah menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota sebagai pengganti dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota. Dengan demikian, sejak diberlakukannya maka seluruh pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di seluruh Provinsi dan Kabupaten/Kota di Indonesia akan merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut.

Dalam pasal 13 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2020 disebutkan bahwa tata kerja TKPK Provinsi dan TKPK Kabupaten/Kota dilakukan berdasarkan agenda kerja tahunan

dimana salah satunya adalah menyusun dokumen LP2KD (Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan).

Dengan kondisi sebagaimana di uraikan di atas, sekaligus memenuhi amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2020, Pemerintah Kabupaten Gresik menyusun dokumen LP2KD (Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah) Kabupaten Gresik Tahun 2024.

1.2. **Maksud dan Tujuan.**

Dokumen ini disusun dengan maksud untuk menyediakan Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) di Kabupaten Gresik sesuai dengan ketentuan pada Pasal 13 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota.

Adapun tujuannya adalah:

1. mendeskripsikan kondisi capaian kinerja dan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Gresik Tahun 2024;
2. mendeskripsikan hambatan dan tantangan pelaksanaan penang-gulangan kemiskinan di Kabupaten Gresik Tahun 2024;

3. merumuskan rekomendasi dari pelaksanaan penanggulangan kemiskinan Kabupaten Gresik Tahun 2024.

1.3. **Landasan Hukum.**

Penyusunan dokumen Laporan Pelaksanaan penanggulangan Kemiskinan Daerah ini, merupakan kegiatan Pemerintah Kabupaten Gresik dengan dasar hukum kegiatan ini adalah:

(1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembar Negara Republik Indonesia tahun 2004 nomor 104, tambahan Lembar Negara Republik Indonesia nomor 4421);

(2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2007 tentang RPJPN Tahun 2005-2025 (Lembar Negara Republik Indonesia tahun 2007 nomor 33);

(3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

(4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2007 tentang RPJPN Tahun 2005-2025 (Lembar Negara Republik Indonesia tahun 2007 nomor 33, tambahan Lembar Negara Republik Indonesia nomor 4700);

(5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembar Negara Republik Indonesia tahun 2011 nomor 83, tambahan Lembar Negara Republik Indonesia nomor 5235);

(6) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, sebagaimana telah disesuaikan dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembar Negara Republik Indonesia tahun 2015 nomor 199);

(7) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 166 Tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembar Negara Republik Indonesia tahun 2014 nomor);

(8) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

(9) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;

(10) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumberdaya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 794);

(11) Keputusan Bupati Gresik Nomor 050/399/HK/437.12/2021 Tahun 2021 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Gresik Tahun 2021-2024.

1.4. Sistematika Penulisan.

Penulisan Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan.

Bab II Gambaran Umum Daerah.

BAB III Kelembagaan Penanggulangan Kemiskinan.

BAB IV Capaian Kinerja dan Program Penanggulangan Kemiskinan.

BAB V Penutup.

PEMERINTAH
KABUPATEN GRESIK

TKPK
Kabupaten Gresik

Bab 2
Gambaran Umum Daerah

LP2KD
2024

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
PENELITIAN dan PENGEMBANGAN DAERAH

BAB 2 Gambaran Umum Daerah

2.1. Geografi dan Topografi.

Kabupaten Gresik yang terletak pada 112-113 Bujur Timur dan 07-08 Lintang Selatan. merupakan wilayah dataran yang berbatasan dengan pantai, berada di sebelah Barat Laut dari ibukota Provinsi Jawa Timur (Surabaya), dengan batas wilayah:

- sebelah utara : Laut Jawa
- sebelah barat : Kab. Lamongan
- sebelah selatan : Kab. Sidoarjo, Kab. Mojokerto, dan Kota Surabaya
- sebelah timur : Selat Madura

Secara umum, wilayah kabupaten Gresik dibagi menjadi dua, yaitu Gresik daratan dan Pulau Bawean. Kabupaten Gresik memiliki luas 1,256 km^2, termasuk didalam nya kawasan Pulau Bawean dengan luas wilayah ±190 km^2. Hampir sepertiga bagian dari wilayah Kabupaten Gresik merupakan pesisir pantai, yaitu sepanjang Kecamatan Kebomas, sebagian Kecamatan Gresik, Kecamatan Manyar, Kecamatan Bungah dan Kecamatan Ujungpangkah. Sedangkan kecamatan Sangkapura dan kecamatan Tambak berada di Pulau Bawean.

Sebagian besar wilayah di Kabupaten Gresik memiliki tinggi kurang dari 200 mdpl. Selanjutnya, berdasarkan jarak ke Ibukota Kabupaten Gresik, Kecamatan Gresik merupakan kecamatan yang memiliki jarak terdekat ke ibukota di Kabupaten Gresik dengan jarak 1,3 km.

Wilayahnya merupakan dataran rendah dengan ketinggian 2 - 12 meter di atas permukaan air laut kecuali Kecamatan Panceng yang mempunyai ketinggian 25 meter di atas permukaan air laut. Hampir sepertiga bagian dari wilayah Kabupaten Gresik merupakan daerah pesisir pantai, yaitu sepanjang Kecamatan Kebomas, sebagian Kecamatan Gresik, Kecamatan Manyar, Kecamatan Bungah dan Kecamatan Ujungpangkah. Sedangkan Kecamatan Sangkapura dan Kecamatan Tambak berada di Pulau Bawean.

Lokasi Kabupaten Gresik yang berada di sekitar garis khatulistiwa menye-babkan daerah ini mengalami perubahan iklim dua jenis setiap tahun, yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Musim kemarau berkisar pada bulan April hingga Oktober, sedangkan musim penghujan dari bulan Oktober hingga April. Curah hujan yang cukup tinggi terjadi pada bulan Desember sampai dengan Maret. Diantara dua musim tersebut terdapat musim pancaroba, dimana biasanya ditandai dengan tiupan angin kering yang cukup kencang yang biasa disebut Angin Gending.

2.2. **Administrasi Wilayah.**

Secara administratif Kabupaten Gresik terbagi ke dalam 18 (delapan belas) kecamatan yang terbagi menjadi 333 desa dan 26 Kelurahan, dengan 2 (dua) kecamatan berada di pulau Bawean adalah Kecamatan Sangkapura dan Kecamatan Tambak.

Tabel 2.1
Pembagian Wilayah Administratif dan Luas Wilayah

Kecamatan		Jumlah				Luas Wilayah (km^2)
		Desa	Kelurahan	RW	RT	
(1)		(2)	(3)	(5)	(7)	(8)
01	Wringinanom	16	-	90	320	62,62
02	Driyorejo	16	-	109	456	51,30
03	Kedamean	15	-	98	329	65,96
04	Menganti	22	-	154	488	68,71
05	Cerme	25	-	127	371	71,73
06	Benjeng	23	-	104	332	61,26
07	Balongpanggang	25	-	108	321	63,88
08	Duduksampean	23	-	57	192	74,29
09	Kebomas	11	10	92	450	30,06
10	Gresik	5	16	80	362	5,54
11	Manyar	23	-	117	521	95,42
12	Bungah	22	-	106	291	79,49
13	Sidayu	21	-	70	194	47,13
14	Dukun	26	-	101	320	59,03
15	Panceng	14	-	72	226	62,59
16	Ujungpangkah	13	-	88	264	94,82
17	Sangkapura	17	-	133	298	118,72
18	Tambak	13	-	96	203	78,70
	Jumlah	330	36	1.802	5.938	1.191,25

Sumber: *Publikasi BPS, data di olah*

Dari 18 kecamatan yang ada, Kecamatan Sangkapura merupakan kecamatan terluas yang memiliki luas 118,72 Km2 atau sekitar 9,97

persen dari seluruh luas wilayah Kabupaten Gresik. Sedangkan wilayah terkecil adalah Kecamatan Kebomas dengan luas 30.06 Km2 atau sekitar 2,52 persen dari luas wilayah Kabupaten Gresik.

Gambar 2.1
Peta Wilayah Administrasi Kabupaten Gresik

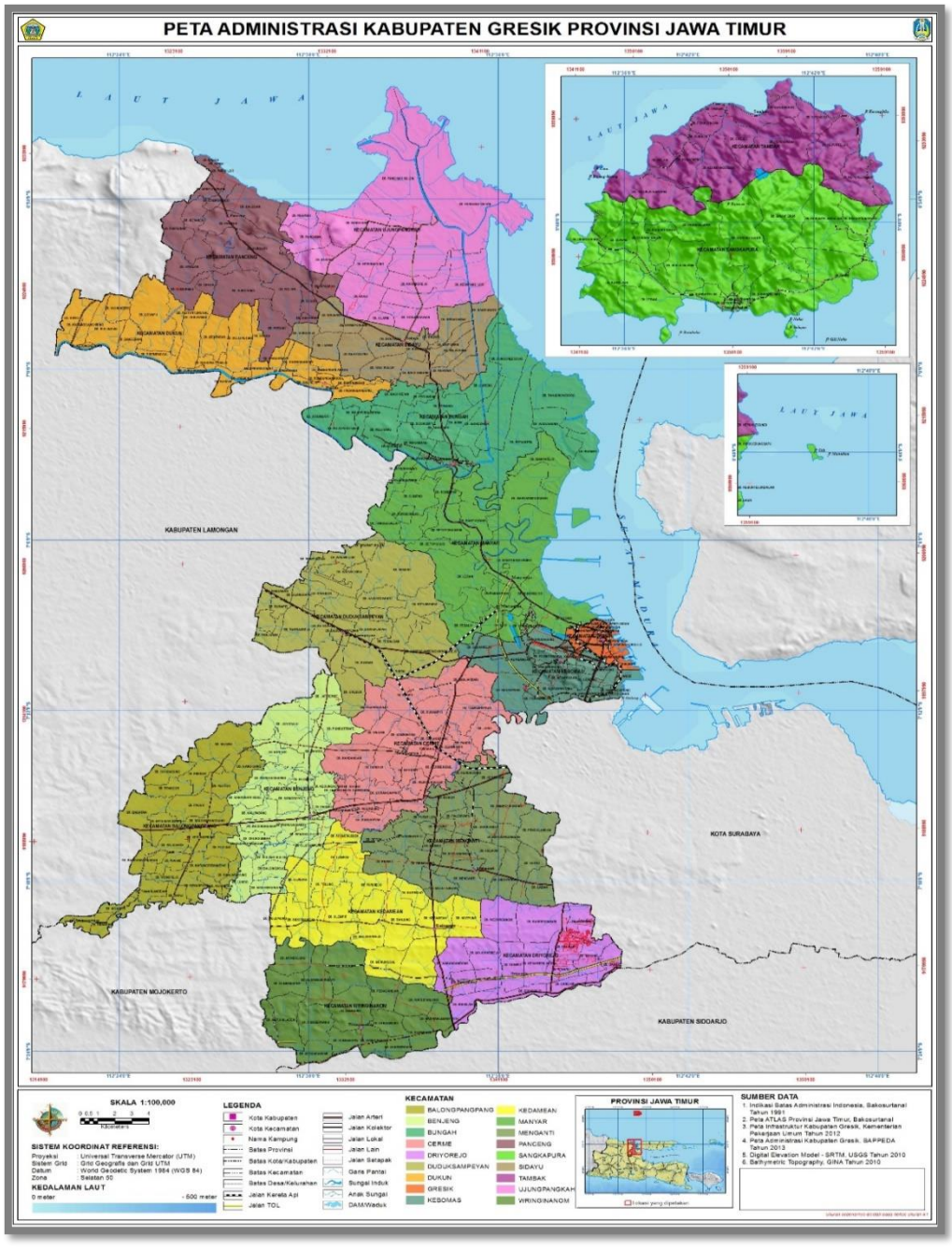

2.3. **Penduduk dan Ketenagakerjaan.**

Berdasarkan data kependudukan, jumlah penduduk Kabupaten Gresik pada tahun 2023 berjumlah 1.296.688 jiwa. Kondisi ini menunjukkan peningkatan sebesar 0,40 persen jika dibandingkan dengan jumlah penduduk pada tahun 2022 yang tercatat sebesar 1.291.518 jiwa.

Gambar 2.2
Perkembangan Jumlah Penduduk Kabupaten Gresik
Tahun 2020-2024

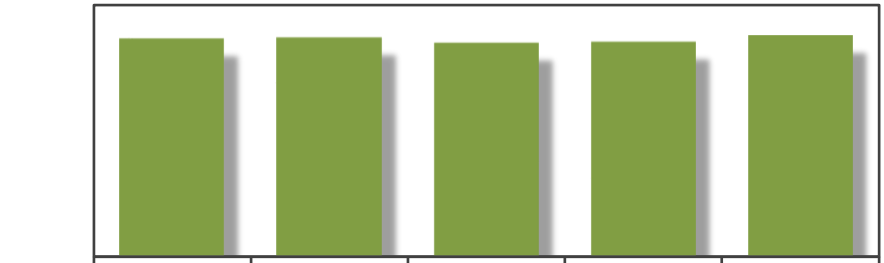

	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah	1.311.215	1.314.895	1.291.518	1.296.688	1.327.497

Sumber*: Publikasi BPS – data di olah*

Angka kepadatan penduduk Kabupaten Gresik pada tahun 2024 sebesar ±1.114 jiwa/km², angka ini mengalami peningkatan jika dibandingkan angka kepadatan penduduk tahun 2023 yang sebesar ±1.083 jiwa/ km². Kepadatan penduduk tertinggi di Kabupaten Gresik pada tahun 2023 terdapat di Kecamatan Gresik dengan kepadatan penduduk ±14.407 jiwa/km^2 dan pada tahun 2024 angka kepadatannya naik menjadi ±14.441 jiwa/km^2, sedangkan Kecamatan Tambak merupakan kecamatan dengan kepadatan terendah yaitu pada tahun 2023 sebesar ±385

jiwa/km^2, sedangkan pada tahun 2024 angka kepadatannya naik menjadi ±394 jiwa/km^2.

Tabel 2.2

Jumlah dan Kepadatan Penduduk Kabupaten Gresik menurut Kecamatan, Tahun 2023 dan 2024

Kecamatan		Luas (km^2)	Tahun 2023		Tahun 2024	
			Jumlah Penduduk	Kepadatan (jiwa / km^2)	Jumlah Penduduk	Kepadatan (jiwa / km^2)
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
010	Wringinanom	62,62	72.672	1.161	74.154	1.184
020	Driyorejo	51,30	104.402	2.035	108.924	2.124
030	Kedamean	65,96	63.290	960	64.213	974
040	Menganti	68,71	127.809	1.860	133.875	1.948
050	Cerme	71,73	81.460	1.136	83.903	1.170
060	Benjeng	61,26	65.612	1.071	66.608	1.087
070	Balongpanggang	63,88	56.290	881	56.862	890
080	Duduksampean	74,29	49.470	666	49.736	669
090	Kebomas	30,06	112.068	3.728	115.078	3.828
100	Gresik	5,54	79.815	14.407	80.005	14.441
110	Manyar	95,42	118.437	1.241	122.645	1.285
120	Bungah	79,49	68.201	858	69.581	876
130	Sidayu	47,13	43.689	927	44.542	945
140	Dukun	59,03	65.632	1.112	66.086	1.118
150	Panceng	62,59	52.626	841	53.606	856
160	Ujungpangkah	94,82	51.760	546	52.359	552
170	Sangkapura	118,72	53.122	447	54.311	457
180	Tambak	78,70	30.333	385	31.009	394
	Jumlah	1.191,25	1.296.688	1.089	1.327.497	1.114

Sumber*: Publikasi BPS – data di olah*

Pada tahun 2024, jumlah penduduk Kabupaten Gresik yang berjumlah 1.327.497 jiwa terdiri dari 667.540 jiwa laki-laki dan 659.957 jiwa perempuan, sehingga memiliki angka rasio seks sebesar 101 yang berarti bahwa dari 100 penduduk perempuan terdapat ±101 penduduk laki-laki.

Berdasarkan komposisi usia, penduduk Kabupaten Gresik pada tahun 2024 lebih banyak berusia produktif yang berada pada usia antara 15–64 tahun sebanyak 942.326 jiwa atau sebesar 70,99 persen. Sementara itu untuk kelompok usia tidak produktif (usia kurang dari 15 tahun dan usia 65 tahun ke atas) sebanyak 385.171 jiwa atau 29,01 persen. Dengan demikian rasio ketergantungan penduduk Kabupaten Gresik pada tahun 2024 adalah sebesar 40,87 persen.

Gambar 2.3

Persentase Penduduk Kabupaten Gresik, berdasar sebaran kelompok Usia Produktif

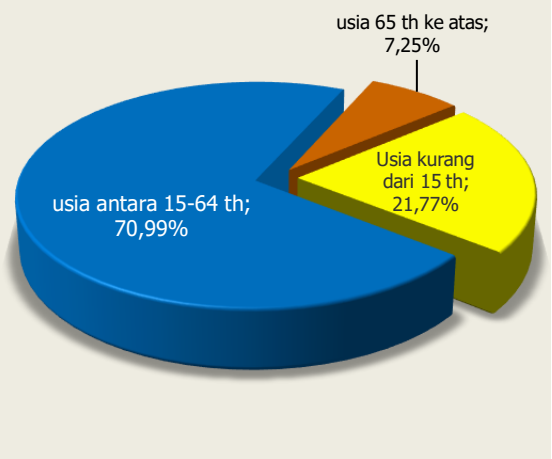

Sumber: *Publikasi BPS – data di olah*

Berdasarkan hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas), yang merupakan survei khusus untuk mengumpulkan data ketenagakerjaan, jumlah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) di Kabupaten Gresik pada Agustus 2024 sebanyak 1.068,265 orang, meningkat sekitar 14,37 ribu orang (0,36%) dibandingkan keadaan setahun yang lalu. Dari jumlah

penduduk usia kerja tersebut, terdiri dari angkatan kerja sebanyak 764.971 orang dan 303.294 orang penduduk bukan angkatan kerja. Dengan demikian, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Gresik pada tahun 2024 mencapai 71,61 persen.

Dari penduduk angkatan kerja tersebut, terdapat penduduk angkatan kerja yang bekerja sebanyak 715.619 orang, bertambah sekitar 26,97 ribu orang (3,92%) dibandingkan dengan keadaan Agustus 2023. Sementara itu, jumlah pengangguran terbuka di Kabupaten Gresik pada Agustus 2024 mencapai 49.352 orang, berkurang sebanyak 0,81 ribu orang (-1,61%) dibandingkan keadaan Agustus 2023. Dengan demikian Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Gresik pada tahun 2024 mencapai 6,45 persen, dengan Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) sebesar 93,55 persen.

Sektor jasa masih merupakan sektor yang paling banyak menyerap tenaga kerja dengan menyerap sebanyak 358.844 orang atau sebesar 55,14 persen dari total penduduk yang bekerja, sedangkan sektor pertanian paling sedikit menyerap tenaga kerja, yaitu hanya sebesar 13,95 persen dari total penduduk bekerja. Berdasarkan status pekerjaan utama, sebagian besar pekerja di Kabupaten Gresik adalah sebagai buruh/karyawan/pegawai yaitu sebesar 51,61 persen dari sejumlah angkatan kerja yang bekerja.

Tabel 2.3
Perkembangan Indikator Ketenagakerjaan Kabupaten Gresik,
Tahun 2022-2024

Indikator	Keadaan Agustus Tahun:		
	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)
Penduduk usia kerja (usia 15^{+})	1.055.406	1.053.894	1.068.265
Penduduk angkatan kerja	720.872	719.013	764.971
bekerja	664.371	668.645	715.619
pengangguran terbuka	56.501	50.368	49.352
Penduduk bukan angkatan kerja	334.534	334.881	303.294
masih sekolah	77.711	104.721	77.102
Penduduk *idle*	256.823	230.160	226.192
Penduduk bekerja di sektor pertanian	92.520	97.888	99.824
Penduduk bekerja di sektor industri	236.167	261.791	256.951
Penduduk bekerja di sektor jasa	335.684	328.966	358.844

Sumber: *BPS. Keadaan Angkatan Kerja Provinsi JawaTimur - data di olah*.

2.4. **Ekonomi Daerah.**

Untuk mendapatkan gambaran tentang kondisi ekonomi suatu daerah adalah dengan melihat bagaimana struktur ekonomi dan perkembangan ekonominya.

1) Struktur Ekonomi.

Struktur ekonomi Kabupaten Gresik dapat diketahui dengan melihat perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Gresik pada kurun waktu tertentu, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan.

Selama lima tahun terakhir (Tahun 2020-2024) struktur perekonomian Kabupaten Gresik di dominasi oleh 5 (lima) kategori lapangan usaha, diantaranya Industri Pengolahan; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor; Konstruksi; Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan ; terakhir adalah kategori Pertambangan dan Penggalian. Hal ini dapat dilihat dari peranan masingmasing lapangan usaha terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Gresiksebagaimana disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.4
Distribusi Persentase PDRB-ADHB Kabupaten Gresik
Tahun 2020-2024

Kategori Lapangan Usaha		2020	2021	2022	2023	2024
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A	Pertanian, Kehutanan Perikanan	7,70	7,02	6,76	6,79	6,55
B	Pertambangan dan Penggalian	5,96	6,94	8,39	6,88	6,14
C	Industri Pengolahan	49,59	49,96	49,44	50,33	51,25
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,51	0,47	0,45	0,43	0,43
E	Pengadaan Air, Pengelo-laan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,07	0,07	0,06	0,06	0,06
F	Konstruksi	9,42	8,92	8,74	8,79	8,67
G	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	12,47	12,62	12,67	12,92	12,89
H	Transportasi dan Pergudangan	2,48	2,37	2,50	2,78	2,87

Lanjutan Tabel 2.4

Kategori Lapangan Usaha		2020	2021	2022	2023	2024
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,33	1,35	1,36	1,42	1,44
J	Informasi dan Komunikasi	4,48	4,47	4,14	4,16	4,20
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	1,20	1,16	1,13	1,12	1,13
L	Real Estate	1,40	1,39	1,32	1,30	1,27
M,N	Jasa Perusahaan	0,32	0,31	0,29	0,30	0,31
O	Administrasi Pemerinta-han, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1,41	1,31	1,20	1,17	1,25
P	Jasa Pendidikan	0,94	0,90	0,81	0,83	0,82
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,45	0,45	0,41	0,40	0,41
R,S,T,U	Jasa Lainnya	0,27	0,28	0,31	0,31	0,32
Produk Regional Domestik Bruto		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber*: BPS, PDRB Kabupaten Gresik Menurut Lapangan Usaha Tahun 2020-2024*

Peranan terbesar dalam pembentukan PDRB Kabupaten Gresik pada tahun 2024 dihasilkan oleh lapangan usaha Industri Pengolahan, yaitu mencapai 51,25 persen (angka ini meningkat dari 49,59 persen di tahun 2020). Selanjutnya lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor sebesar 12,89 persen (meningkat dari 12,47 persen di tahun 2020), serta lapangan usaha Konstruksi sebesar 8,67 persen (turun dari 9,42 persen di tahun 2020). Berikutnya lapangan

usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 6,55 persen (turun dari 7,70 persen di tahun 2020); serta lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian sebesar 6,14 persen (meningkat dari 5,96 persen di tahun 2020). Sementara itu, peranan dari 12 lapangan usaha lainnya, masing-masing kurang dari 5 persen.

Pada tahun 2024, di antara kelima lapangan usaha tersebut, hanya ada 1 kategori yang mengalami peningkatan peranan jika dibandingkan tahun 2023, yaitu Industri Pengolahan. Sementara peranan kategori Pertambangan dan Penggalian; Konstruksi; dan Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan memiliki kecenderungan menurun. Pada Kategori Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor cenderung meningkat, namun mengalami penurunan pada tahun 2024.

2) Pertumbuhan Ekonomi.

Berdasarkan harga konstan 2010, nilai PDRB Kabupaten Gresik pada tahun 2024 meningkat dibandingkan tahun 2023. Peningkatan tersebut dipengaruhi oleh meningkatnya produksi di sebagian besar lapangan usaha yang sudah bebas dari pengaruh inflasi. Nilai PDRB Kabupaten Gresik atas dasar harga konstan 2010 mencapai 119,27 triliun rupiah pada tahun 2023. Angka tersebut naik dari 5,45 triliun rupiah pada tahun 2024. Hal tersebut menunjukkan bahwa selama tahun 2024 per-ekonomian Kabupaten Gresik tumbuh sebesar 4,79 persen, tumbuh lebih cepat dibandingkan tahun sebelumnya yang tumbuh sebesar 4,62 persen.

Gambar 2.4
Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Gresik
Tahun 2020-2024

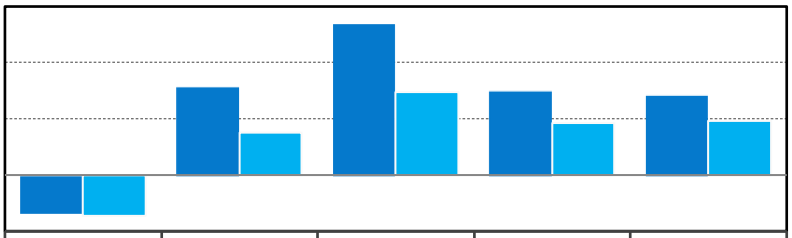

	2020	2021	2022	2023	2024
Laju PDRB-ADHB	-3,33	7,74	13,31	7,42	7,00
Laju PDRB-ADHK	-3,68	3,79	7,38	4,62	4,79

Sumber : *BPS, PDRB Kab. Gresik Menurut Lapangan Usaha, 2020-2024 – data di olah*

Perbaikan sosial ekonomi pasca pandemi COVID-19 mampu mendorong perekonomian Kabupaten Gresik selama tahun 2024. Seluruh lapangan usaha perekonomian tumbuh positif selama tahun 2024, kecuali Pertambangan dan Penggalian yang mengalami kontraksi sedalam 5,49 persen.

Mobilitas penduduk yang meningkat seiring dengan membaiknya pandemi pada tahun 2024 masih memberikan multiplier effect pada beberapa sektor ekonomi. Selain itu, beberapa peristiwa penting seperti

Pemilu dan Pilkada serentak tahun 2024 juga memengaruhi beberapa sektor ekonomi. Kategori Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib tumbuh paling tinggi di antara kategori lain, yaitu 8,88 persen.

Pemanfaatan digitalisasi di hampir semua sektor perekonomian sebagai bentuk adaptasi pelaku ekonomi selama pandemi COVID-19 juga membantu membaiknya perekonomian pasca pandemi di tahun 2024.

Perkembangan e-commerce yang cukup pesat juga mendorong hampir seluruh sektor ekonomi.

3) PDRB per Kapita.

Selain pertumbuhan ekonomi, indikator ekonomi makro lain terkait tingkat kesejahteraan penduduk pada suatu daerah/wilayah dapat dilihat dari nilai PDRB per kapita, yaitu merupakan hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi di suatu daerah/ wilayah dengan jumlah penduduk pertengahan tahun. Oleh karena itu, besar kecilnya jumlah penduduk akan mempengaruhi nilai PDRB per kapita, sedangkan besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat pada daerah/wilayah tersebut.

Tabel 2.5
PDRB dan PDRB per Kapita Kabupaten Gresik, Tahun 2020-2024

	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Nilai PDRB (Milyar Rupiah)					
- ADHB	134.269	144.656	163.908	176.261	188.605
- ADHK 2010	97.617	101.319	108.797	113.825	119.274
PDRB per kapita (Ribu Rupiah)					
- ADHB	102.623	109.418	122.650	130.527	138.271
- ADHK 2010	74.609	76.637	81.411	84.291	87.443
Pertumbuhan PDRB per Kapita (%)	-3,24	2,72	6,23	3,54	3,74

Sumber: *BPS. PDRB Kab. Gresik menurut Lapangan Usaha Tahun 2020-2024*

PEMERINTAH
KABUPATEN GRESIK

TKPK
Kabupaten Gresik

Bab 3
Kelembagaan Penanggulangan Kemiskinan

LP2KD
2024

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
PENELITIAN dan PENGEMBANGAN DAERAH

BAB 3 Kelembagaan Penanggulangan Kemiskinan

3.1. Kelembagaan dan Sumberdaya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK).

Dalam melaksanakan penanggulangan kemiskinan, Pemerintah Kabupaten Gresik telah membentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kabupaten Gresik dengan struktur organisasi, tugas dan fungsi, dan pelaksanaan rapat koordinasi, monitoring evaluasi, serta pengelolaan pengaduan masyarakat adalah sebagaimana diuraikan berikut ini.

3.1.1. Struktur Organisasi TKPK.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2020 tentang tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumberdaya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota, struktur organisasi TKPK (Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan) digambarkan sebagaimana bagan berikut.

Gambar 3.1. Struktur Organisasi TKPK berdasarkan Permendagri 53 / 2020

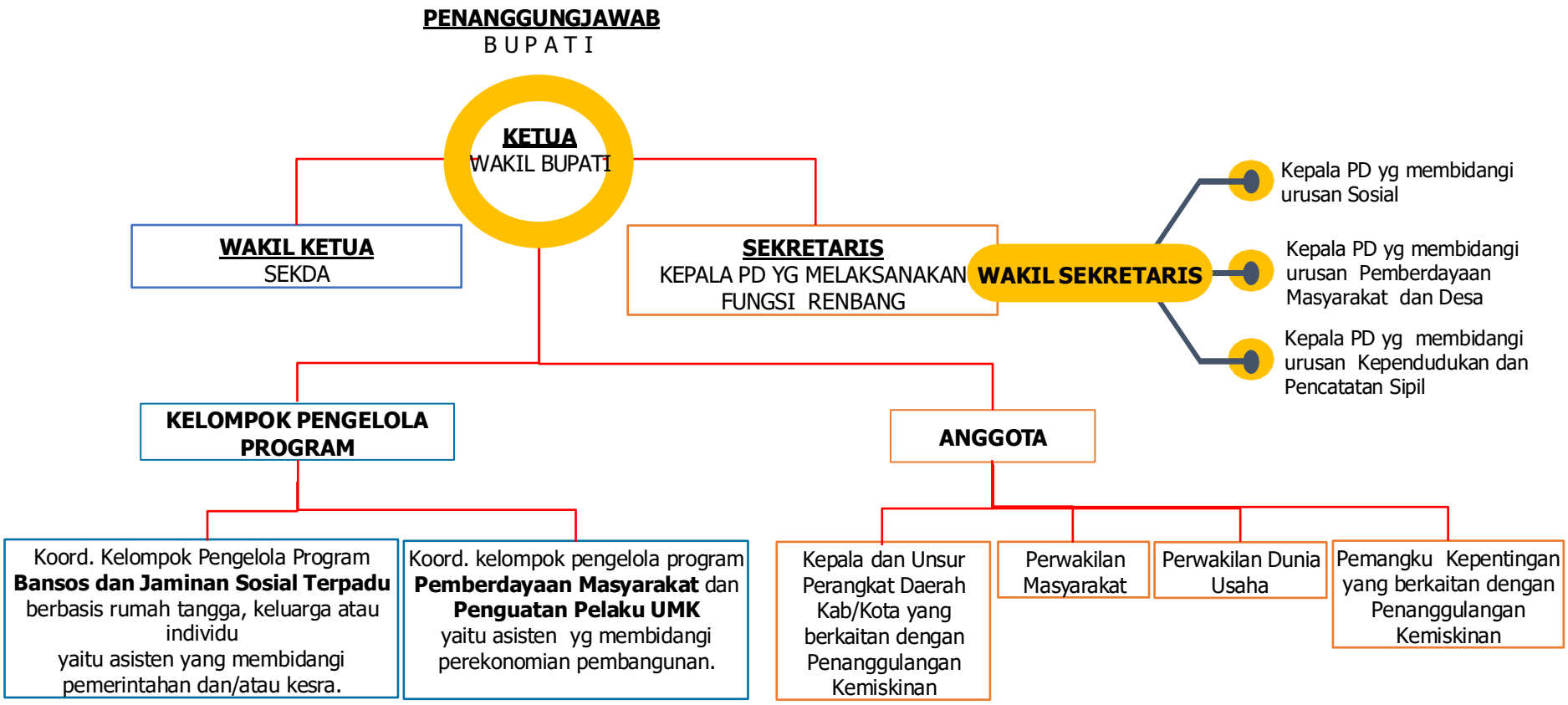

Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Gresik Nomor 050/399/HK/437.12/2021, susunan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Gresik adalah sebagai berikut:

Penasehat	:	Bupati Gresik.
Ketua	:	Wakil Bupati Gresik.
Wakil Ketua	:	Sekretaris Daerah Kab. Gresik.
Sekretaris	:	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Gresik.
Wakil Sekretaris	:	1. Kepala Dinas Sosial Kabupatem Gresik; 2. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa kabupaten Gresik. 3. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik.

Kelompok Program Bantuan Sosial dan Jaminan Sosial Terpadu berbasis Rumah Tangga:

1. Koordinator	:	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Gresik.
2. Wakil Koordinator	:	Kepala Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik.
3. Anggota	:	a. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik; b. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik; c. Direktur RSUD Ibnu Sina Gresik; d. Kepala Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gresik;

e. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik;
f. Kepala Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik;
g. Kepala Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Gresik;
h. Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Gresik;
i. Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Gresik;
j. Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik;
k. Kepala Bidang Pelayanan Pencacatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik;
l. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten Gresik;
m. Kepala Kementerian Agama Kabupaten Gresik;
n. Ketua Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kabupaten Gresik; dan
o. Ketua Pengurus Daerah Muhammadiyah (PDM) Kabupaten Gresik.

Kelompok Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat, Penguatan Pelaku Usaha Mikro, dan Penyediaan Infrastruktur:

1. Koordinator : Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Gresik.
2. Wakil Koordinator : Kepala Bagian Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik.
3. Anggota :
   a. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gresik;
   b. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik;
   c. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Gresik;
   d. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Gresik;
   e. Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik;
   f. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Gresik;
   g. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Gresik;
   h. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gresik;
   i. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik;
   j. Kepala Bagian Program Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik;
   k. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gresik;
   l. Kepala Bagian Program Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik;
   m. Kepala Bidang Perekonomian, Pendanaan dan Investasi pada Badan Perencanaan Pembangu

nan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Gresik;

n. Kepala Bidang Pengembangan Wilayah, Infrastruktur dan Lingkungan Hidup pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Gresik;
o. Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik;
p. Direktur PT. Petrokimia Gresik;
q. Direktur PT. Semen Gresik; dan
r. Pimpinan Bank Jatim.

Sekretariat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kab Gresik:

1. Kepala : Sekretaris pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Gresik.
2. Wakil Kepala : Kepala Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Gresik.
3. Anggota : a. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik;
   b. Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Gresik;
   c. Kepala Bagian Admnistrasi Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik;
   d. Kepala Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik;

e. Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kab. Gresik;
f. Kepala Bidang Jaminan dan Perlindungan Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Gresik;
g. Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik;
h. Kepala Sub Bagian Program dan Pelaporan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Gresik;
i. Kepala Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Gresik;
j. Kepala Sub Bidang Pendanaan Pembangunan dan Investasi pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Gresik;
k. Kepala Sub Bidang Pemerintahan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Gresik; dan
l. Kepala Sub Bidang Pendidikan, Mental dan Budaya pada Badan Perencanaan Pembangun an, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kab. Gresik

3.1.2. Tugas dan Fungsi TKPK.

Sebagaimana diatur dalam pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumberdaya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota, memiliki tugas melakukan koordinasi perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan di wilayahnya.

Dalam melaksanakan tugas, TKPK menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan RPKD dan rencana aksi;
b. koordinasi penyusunan rancangan RKPD bidang Penanggulangan Kemiskinan;
c. koordinasi pelaksanaan program bidang Penanggulangan Kemiskinan;
d. fasilitasi pengembangan kemitraan Penanggulangan Kemiskinan;
e. penyusunan instrumen pemantauan, pelaksanaan pemantauan, dan pelaporan hasil pemantauan pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan;
f. pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang Penanggulangan kemiskinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan; dan
g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati/Walikota.

Tata kerja TKPK dilakukan berdasarkan agenda kerja tahunan.

3.2. **Pelaksanaan Agenda Kerja TKPK**.

Tata kerja TKPK dilakukan berdasarkan agenda kerja tahunan dilakukan melalui rapat koordinasi TKPK yang dilaksanakan paling sedikit 3 kali dalam 1 tahun atau sesuai dengan kebutuhan. Rapat koordinasi dipimpin oleh Ketua TKPK Kabupaten Gresik berupa:

- Rapat koordinasi tingkat daerah (TKPK Kabupaten Gresik, maupun TKPK Kabupaten Gresik dengan Provinsi Jawa Timur) maupun Rapat koordinasi dengan kelembagaan di tingkat pusat;
- Penyusunan dokumen RPKD, RAT, serta LP2KD; dan
- Advokasi dokumen RPKD, RAT, serta LP2KD.

Di samping rapat-rapat koordinasi, TKPK Kabupaten Gresik juga melakukan kegiatan fasilitasi beberapa kegiatan terkait penanggulangan kemiskinan.

Kegiatan Rapat Koordinasi TKPK Kabupaten Gresik melibatkan seluruh unsur yang terlibat dalam struktur TKPK Kabupaten Gresik. Selaku penanggungjawab, Wakil Bupati Gresik berperan penting dalam menggerakkan seluruh elemen untuk mensukseskan program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Gresik.

Adapun rapat koordinasi TKPK Kabupaten Gresik yang dilaksanakan selama tahun 2024 adalah sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

Tabel 3.1

Pelaksanaan Agenda Kerja TKPK Kabupaten Gresik, Tahun 2024

Tanggal	Agenda Acara	Peserta	Keputusan Penting
(1)	(2)	(3)	(4)
15 Jan 2024	Penyiapan permintaan laporan reali sasi program/kegiatan penanggulangan kemiskinan semester II-2023	OPD pengampu per-cepatan penghapus-an kemiskinan ekstrem	OPD menyiapkan data dukung
13 Mei 2024	Rapat koordinasi spending review sektor pengentasan kemiskinan dan penurunan stunting triwulan II / 2024 Kabupeten Gresik	Seluruh OPD peng-ampu percepatan penghapusan kemiskinan ekxtrem	
11 Juni 2024	Pembahasan Laporan Penda-huluan penyusunan dokumen LP2KD	TKPK	OPD menyiapkan data dukung
25 Juni 2024	Pembahasan draf dokumen LP2KD	TKPK	
12 Agst 2024	Pembahasan Laporan Penda-huluan penyusunan dokumen RAT PKD	TKPK	OPD menyiapkan data dukung
04 Sept 2024	Pembahasan draf Laporan Akhir dokumen RAT PKD	TKPK	
26 Nov 2024	Rapat koordinasi asistensi pengolahan data kemiskinan Kabupaten Gresik tahun 2024	Seluruh OPD peng-ampu percepatan pengha pusan kemiskinan ekxtrem	

Sumber: *Sekretariat TKPK Kabupaten Gresik*

Pemerintah Kabupaten Gresik melalui TKPK (Tim Koordinasi Penanggu-langan Kemiskinan) Kabupaten Gresik selama tahun 2024 mengikuti pertemuan terkait penanggulangan kemiskinan di tingkat Provinsi Jawa Timur maupun Nasional, yaitu:

- tanggal 26 Februari 2024; Forum Konsolitasi Nasional Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Tahun 2024, bersama Bappeda se-Provinsi Jawa Timur, Dinas Sosial se-Provinsi Jawa Timur, Dinas PMD

se-Provinsi Jawa Timur, Dinas Pendukcapil se-Provinsi Jawa Timur, Dinas KBPPPA se-Provinsi Jawa Timur;

- tanggal 25-26 Maret 2024; bersama Gubernus se-Indonesia, Bupati/ Walikota se-Indonesia, dalam pertemuan penyusunan instrumen keberhasilan penghapusan kemiskinan ekstrem di daerah dan sosialisasi kebijakan pemberian penghargaan dalam bentuk Insentif Fiskal kategori Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Tahun 2024;
- tanggal 24-26 April 2024; menghadiri rapat koordinasi penanggulangan kemiskinan (TKPK) Provinsi Jawa Timur tahun 2024, bersama Bappeda se Provinsi Jawa Timur;
- tanggal 6-8 Mei 2024; bersama Bappeda se Provinsi Jawa Timur, menghadiri rapat koordinasi dan sinkronisasi program kegiatan bidang sosial tahun 2025;
- tanggal 7 Mei 2024; bersama Gubernus se-Indonesia, Bupati/Walikota se-Indonesia, menghadiri Rapat koordinasi dan *coaching clinic* pemberian penghargaan dan bentuk insentif fiskal 2024;
- tanggal 20 Juni 2024; menghadiri pertemuan dalam rangka kolaborasi pemanfaatan sistem data registrasi sosial ekonomi dalam mewujudkan satu data menuju indonesia emas 2045, bersama Bappeda se-Provinsi Jawa Timur, Dinas Sosial se-Provinsi Jawa Timur, Dinas PMD se-Provinsi Jawa Timur, Dinas Pendukcapil se-Provinsi Jawa Timur, Dinas KBPPPA se-Provinsi Jawa Timur;

- tanggal 8 Juli 2024; menghadiri Rapat Koordinasi Regional Upaya Penghapusan Kemiskinan Ekstrem 2024 Untuk regional 3, bersama Gubernus se-Indonesia, Bupati/Walikota se-Indonesia;
- Tanggal 7 September 2024; bersama Bappeda se-Provinsi Jawa Timur, Dinas Sosial se-Provinsi Jawa Timur, Dinas PMD se-Provinsi Jawa Timur, Dinas Pendukcapil se-Provinsi Jawa Timur, Dinas KBPPPA se-Provinsi Jawa Timur, b erbagi pengalaman dan pembelajaran inovasi dan praktik baik pemanfaatan data P3KE untuk percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.

3.3. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penanggulangan Kemiskinan.

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Gresik dilaksanakan dengan mengamati pencapaian indikator program dan kegiatan dalam tahapan sebagai berikut:

1. masukan (input);
2. kegiatan (process);
3. keluaran (output);
4. sasaran (outcome);
5. tujuan (goals).

Monitoring dan evaluasi penanggulangan kemiskinan dilakukan terhadap:

1. monitoring terhadap pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan yang ada di setiap bidang Perangkat Daerah;

2. monitoring terhadap program penanggulangan kemiskinan bersasaran;
3. evaluasi terhadap *output* program-program penanggulangan kemiskinan yang ada di setiap bidang Perangkat Daerah;
4. evaluasi terhadap capaian indikator (*outcome*) kemiskinan.

Metode yang digunakan dalam melakukan monitoring dan evaluasi antara lain:

1. metode survei: mengumpulkan informasi yang relevan dari responden yang diperoleh dari sample yang representatif.
2. metode partisipatif: mendapatkan informasi dengan cara pelibatan intensif dan observasi langsung dalam waktu tertentu.
3. analisis anggaran: menganalisis item-item pengeluaran program dan membandingkan dengan rencana awal.
4. kunjungan lapangan (*spot check/rapid appraisal*): memperoleh informasi secara cepat dari penerima program dan dari pemangku kepentingan lainnya.

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi program penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Gresik dilaksanakan dengan target adalah pelaksanaan penanggulangan kemiskinan ekstrem di Kabupaten Gresik, dan pemutakhiran data kemiskinan ekstrem Kabupaten Gresik tahun 2024.

3.4. **Penanganan Pengaduan Masyarakat**.

Secara luas, pengertian pengaduan masyarakat pada program penanggulangan kemiskinan adalah langkah/tindakan masyarakat yang ditujukan pada pengelola program, menyangkut upaya masyarakat untuk:

- memperoleh informasi/kejelasan mengenai suatu programatau kegiatan atau pelayanan yang terkait dengan masyarakat miskin;
- menyampaikan keluhan terkait dengan pelayanan yang diterima oleh masyarakat miskin; dan
- menyampaikan komplain terkait dengan kerugian yang dialami oleh masyarakat miskin akibat pelaksanaan pembangunan.

3.5. **Hambatan dan Tantangan Pelaksanan Penanggulangan Kemiskinan.**

Beberapa hambatan dan tantangan yang ditemui dalam pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Gresik selama tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1) dalam hal Program/Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan:

Hal terpenting dalam perencanaan program penanggulangan kemiskinan adalah menyangkut fokus, lokus, dan komplementaris program. Karena keterbatasan sumberdaya, belum semua OPD pengampu program penanggulangan kemiskinan memperhatikan hal-hal tersebut dalam perencanaan program penanggulangan ke-miskinan.

2) dalam hal Penerima Manfaat Program Penanggulangan Kemiskinan:

Sebagaimana diungkapkan oleh BPS bahwa perlu adanya "satu data" untuk sasaran penerima manfaat program penanggulangan kemiskinan yang dalam hal ini adalah bersumber dari DTKS, sementara belum semua OPD menggunakan sumber data DTKS dalam menentukan sasaran penerima manfaat program penang-gulangan kemiskinan, beberapa OPD mempunyai data sendiri atau menggunakan sumber data lain untuk menentukan sasaran penerima manfaat.

3) dalam hal Lembaga Pelaksana Program Penanggulangan Kemiskinan:

Kinerja Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) masih belum optimal khususnya dalam hal singkronisasi, harmonisasi, dan komplementaris program dan sasaran program penanggulangan kemiskinan.

4) dalam hal Anggaran untuk Penanggulangan Kemiskinan:

Pasca Pandemi Covid, berpengaruh pada kinerja anggaran ter-masuk anggaran penanggulangan kemiskianna yang tidak dapat maksimal.

PEMERINTAH
KABUPATEN GRESIK

TKPK
Kabupaten Gresik

Bab 4

Capaian Kinerja dan Program Penanggulangan Kemiskinan

LP2KD
2024

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
PENELITIAN dan PENGEMBANGAN DAERAH

BAB 4 Capaian Kinerja dan Program Penanggulangan Kemiskinan

4.1. Program Penanggulangan Kemiskinan.

Program Penanggulangan Kemiskinan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, serta masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin. Dan berdasarkan pasal 18 Permendagri Nomor 53 Tahun 2020, program penanggulangan kemiskinan terdiri dari 3 (tiga) kelompok program, yaitu:

1) program bantuan sosial dan jaminan sosial terpadu berbasis rumah tangga, keluarga, atau individu, yang bertujuan untuk melakukan pemenuhan hak dasar, pengurangan beban hidup, dan perbaikan kualitas hidup masyarakat miskin;

2) program pemberdayaan masyarakat dan penguatan pelaku usaha mikro dan kecil, yang bertujuan untuk memperkuat kapasitas kelompok masyarakat miskin untuk terlibat dan mengambil manfaat dari proses pembangunan; dan

3) program lainnya yang secara langsung atau tidak langsung dapat meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat miskin, termasuk program dengan dana desa/dana kelurahan.

Adapun sasaran penerima manfaat program penanggulangan kemiskinan berdasarkan pasal 19 Permandagri Nomor 53 Tahun 2020 adalah berdasarkan pada data berbasis nama, alamat, dan nomor induk kependudukan. Data dimaksud dapat dipersepsikan sebagai data yang bersumber dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Program penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Gresik pada tahun 2022 dibiayai oleh beberapa sumber yaitu program penanggu-langan kemiskinan yang di biayai oleh: (1) APBN sebagai program nasional; (2) APBD Provinsi Jawa Timur sebagai program provinsi; dan (3) APBD Kabu-paten Gresik sebagai program daerah.

4.1.1. Program Nasional dan Provinsi dalam Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Gresik.

Program-program Nasional dan program Provinsi Jawa Timur dalam penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Gresik pada tahun 2024 adalah sebegaimana disajikan pada tabel berikut.

Tabel 4.1 Program Penanggulangan Kemiskinan Nasional dan Provinsi Jawa Timur di Kabupaten Gresik, Tahun 2024

NO URT	NAMA PROGRAM	PENERIMA MANFAAT (jumlah / satuan)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	SUMBER ANGGARAN	PELAKSANA (Kementerian/Dinas/ Lembaga)	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	BKK (Bantuan Khusus Keuangan) Program Jatim Puspa (Pemberda yaan Usaha Perempuan)	133 KPM (Kelompok Penerima Manfaat)	332.500.000	APBD Prov	Provinsi Jawa Timur Dinas PMD Kab. Gresik	Desa Lasem Kec Sidayu, Desa Kertosono Kec Sidayu, dan Desa Mojopetung Kec. Dukun
2	PKH plus (Program Keluarga Harapan)	9.921 KPM (Kelompok Penerima Manfaat)	4.888.000.000	APBD Prov	Dinas Sosial Prov Jawa Timur	realisasi 9.776 KPM
3	Pemberian Apresiasi Seniman Jawa Timur Tahun 2024	25 Penerima	12.500.000	APBD Prov	Provinsi Jawa Timur	Gresik hanya mengirimkan data Calon Penerima Apresiasi Seniman Jawa Timur daerah Kabupaten Gresik Tahun 2024
4	PKH reguler (Program Keluarga Harapan)	42.775 KPM	p.m	APBN	Kementerian Sosial	langsung ke KPM tidak ada informasi realisasi anggaran dari Kementerian Sosial
5	BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai)	72.880 KPM	p.m	APBN	Kementerian Sosial	
6	DAK PPKT	182 Unit	9.188.799.000	APBN	Kementerian PUPR Dinas CKPKP	

Lanjutan tabel 4.1

NO URT	NAMA PROGRAM	PENERIMA MANFAAT (jumlah / satuan)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	SUMBER ANGGARAN	PELAKSANA (Kementerian/Dinas/ Lembaga)	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
7	BSPS (Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya)	250 Unit	5.000.000.000	APBN	Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan (BP2P)	
8	Bantuan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	20 Unit	400.000.000	CSR	BAZNAS	
9	Pembangunan Rumah Layak Huni	74 Unit	pm	CSR	HABITAT	langsung ke penerima manfaat tidak ada informasi realisasi anggaran
10	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	7 Ruang	1.725.561.178	APBN	Kementerian Pendidikan Dinas Pendidikan Kab. Gresik	
11	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	444 Satuan Pendidikan	84.481.982.161	APBN	Kementerian Pendidikan Dinas Pendidikan Kab. Gresik	
12	Pembangunan Ruang Kelas Baru	3 Ruang	941.248.347	APBN	Kementerian Pendidikan Dinas Pendidikan Kab. Gresik	
13	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	1 Ruang	152.811.434	APBN	Kementerian Pendidikan Dinas Pendidikan Kab. Gresik	

Lanjutan tabel 4.1

NO URT	NAMA PROGRAM	PENERIMA MANFAAT (jumlah / satuan)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	SUMBER ANGGARAN	PELAKSANA (Kementerian/Dinas/ Lembaga)	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
14	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	18 Ruang	2.642.220.439	APBN	Kementerian Pendidikan Dinas Pendidikan Kab. Gresik	
15	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	238 Satuan Pendidikan	49.349.315.682	APBN	Kementerian Pendidikan Dinas Pendidikan Kab. Gresik	

Sumber: *Sekretariat TKPK Kabupaten Gresik*

4.1.2. Program Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Gresik.

Program/kegiatan penanggulangan kemiskinan Kabupaten Gresik tahun 2024 (tahun anggaran 2024) terealisasi sebasar Rp 449.333.540.132,- dari anggaran yang semula direncanakan sebesar Rp 481.075.718.673,-. Sebanyak 33 Perangkat Daerah (termasuk 12 Kecamatan) sebagai pelaksana program yang terdiri dari 27 Bidang urusan pmerintah, 50 Program, 62 Kegiatan, dan 110 Sub Kegiatan.

Berikut disajikan tabel-tabel yang memuat pelaksanaan program-program daerah Kabupaten Gresik dalam rangka penanggulangan kemiskinan baik yang dibiayai oleh APBD Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2024 maupun program-program yang dibiayai oleh sumber selain APBD.

Tabel 4.2 Program Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Gresik, Tahun Anggaran 2024 (Sumber dana APBD TA 2024).

URUSAN PEMERINTAH BIDANG PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		ANGGARAN 2024		OPD PELAKSANA
		RENCANA (Rp)	REALISASI (Rp)	
(1)		(2)	(3)	(4)
1.01	**PENDIDIKAN**	193.488.149.663	182.632.958.143	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	193.488.149.663	182.632.958.143	Dinas Pendidikan
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	78.456.421.452	69.329.496.115	
1.01.02.2.01.0006	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	1.556.780.000	1.535.431.096	
1.01.02.2.01.0021	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	48.858.958.452	44.193.070.000	
1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	22.262.123.000	18.516.492.459	
1.01.02.2.01.0047	Pembangunan Ruang Kelas Baru	1.031.000.000	861.370.574	
1.01.02.2.01.0048	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	1.059.280.000	1.058.680.000	
1.01.02.2.01.0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	3.688.280.000	3.164.451.986	
1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	61.523.870.211	59.980.100.028	
1.01.02.2.02.0032	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	46.926.380.000	45.681.920.000	
1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	14.597.490.211	14.298.180.028	
1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	14.100.156.000	13.950.250.000	
1.01.02.2.03.0011	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	14.100.156.000	13.950.250.000	
1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	39.407.702.000	39.373.112.000	
1.01.02.2.04.0010	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	39.407.702.000	39.373.112.000	

Lanjutan tabel 4.2

URUSAN PEMERINTAH BIDANG PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		ANGGARAN 2024		OPD PELAKSANA
		RENCANA (Rp)	REALISASI (Rp)	
(1)		(2)	(3)	(4)
1.02	**KESEHATAN**	169.493.216.254	165.403.815.754	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	169.493.216.254	165.403.815.754	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	169.493.216.254	165.403.815.754	
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	760.000.000	713.012.500	
1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	335.733.500	303.913.950	
1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	717.633.178	564.704.150	
1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	400.953.500	380.051.750	
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pd Usia Pendidikan Dasar	633.791.900	619.818.300	
1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pd Usia Produktif	227.734.000	215.629.000	
1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pd Usia Lanjut	138.955.000	117.208.000	
1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	25.000.000	19.276.368	
1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	2.525.496.530	2.246.660.950	
1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan ODGJ	25.000.000	23.412.920	
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga TB	3.013.278.500	2.923.727.900	
1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dg Risiko Terinfeksi HIV	679.100.125	621.743.200	
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	7.368.997.250	6.829.929.189	

Lanjutan tabel 4.2

URUSAN PEMERINTAH BIDANG PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		ANGGARAN 2024		OPD PELAKSANA
		RENCANA (Rp)	REALISASI (Rp)	
(1)		(2)	(3)	(4)
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1.536.873.000	1.513.557.200	
1.02.02.2.02.0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	169.101.415	141.023.550	
1.02.02.2.02.0024	Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	49.999.360	46.069.150	
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	4.566.744.536	3.753.345.449	
1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	144.908.492.960	143.034.713.628	
1.02.02.2.02.0029	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	70.000.000	55.412.600	
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	1.340.331.500	1.280.606.000	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.563.840	2.563.840	RSUD Ibnu Sina
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	2.563.840	2.563.840	
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	2.563.840	2.563.840	
1.03	**PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**	21.994.962.300	21.403.235.663	
1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	15.125.452.717	14.567.388.933	Dinas Cipta Karya, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	15.125.452.717	14.567.388.933	
1.03.03.2.01.0026	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	658.824.717	549.797.582	

Lanjutan tabel 4.2

URUSAN PEMERINTAH BIDANG PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		ANGGARAN 2024		OPD PELAKSANA
		RENCANA (Rp)	REALISASI (Rp)	
(1)		(2)	(3)	(4)
1.03.03.2.01.0032	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	14.466.628.000	14.017.591.351	
1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	6.869.509.583	6.835.846.730	Dinas Cipta Karya, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	6.869.509.583	6.835.846.730	
1.03.05.2.01.0022	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	5.435.000.000	5.435.000.000	
1.03.05.2.01.0033	Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	300.000.000	299.981.806	
1.03.05.2.01.0038	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	650.003.583	624.452.229	
1.03.05.2.01.0039	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	484.506.000	476.412.695	
1.04	**PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**	17.223.697.824	16.173.074.944	
1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	6.935.000.000	6.935.000.000	Dinas Cipta Karya, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.04.03.2.03	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	6.935.000.000	6.935.000.000	
1.04.03.2.03.0002	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	6.935.000.000	6.935.000.000	

Lanjutan tabel 4.2

URUSAN PEMERINTAH BIDANG PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		ANGGARAN 2024		OPD PELAKSANA
		RENCANA (Rp)	REALISASI (Rp)	
(1)		(2)	(3)	(4)
1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	10.288.697.824	9.238.074.944	Dinas Cipta Karya, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.04.05.2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	10.288.697.824	9.238.074.944	
1.04.05.2.01.0002	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	10.288.697.824	9.238.074.944	
1.05	**KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT**	813.776.970	732.010.150	
1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	28.939.118	24.300.800	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.05.03.2.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	28.939.118	24.300.800	
1.05.03.2.01.0004	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (per jenis ancaman bencana)	28.939.118	24.300.800	
1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	784.837.852	707.709.350	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.05.03.2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	784.837.852	707.709.350	
1.05.03.2.03.0009	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kab/Kota	784.837.852	707.709.350	
1.06	**SOSIAL**	19.758.000.000	14.169.000.000	
1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	2.031.200.000	1.968.400.000	Dinas Sosial
1.06.02.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	2.031.200.000	1.968.400.000	

Lanjutan tabel 4.2

URUSAN PEMERINTAH BIDANG PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		ANGGARAN 2024		OPD PELAKSANA
		RENCANA (Rp)	REALISASI (Rp)	
(1)		(2)	(3)	(4)
1.06.02.2.03.0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	2.031.200.000	1.968.400.000	
1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	4.624.800.000	4.494.600.000	Dinas Sosial
1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	4.624.800.000	4.494.600.000	
1.06.04.2.01.0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	4.624.800.000	4.494.600.000	
1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	13.102.000.000	7.706.000.000	Dinas Sosial
1.06.05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	13.102.000.000	7.706.000.000	
1.06.05.2.02.0003	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	13.102.000.000	7.706.000.000	
2.07	**TENAGA KERJA**	**3.468.028.695**	**3.010.387.176**	
2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	2.730.000.000	2.442.539.377	Dinas Tenaga Kerja
2.07.03.2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	2.730.000.000	2.442.539.377	
2.07.03.2.01.0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	2.730.000.000	2.442.539.377	

Lanjutan tabel 4.2

URUSAN PEMERINTAH BIDANG PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		ANGGARAN 2024		OPD PELAKSANA
		RENCANA (Rp)	REALISASI (Rp)	
(1)		(2)	(3)	(4)
2.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	408.355.125	286.549.410	Dinas Tenaga Kerja
2.07.04.2.01	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	408.355.125	286.549.410	
2.07.04.2.01.0002	Pelayanan antar Kerja	312.550.005	241.452.960	
2.07.04.2.01.0005	Perluasan Kesempatan Kerja	95.805.120	45.096.450	
2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	329.673.570	281.298.389	
2.07.05.2.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	329.673.570	281.298.389	
2.07.05.2.01.0003	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	329.673.570	281.298.389	
2.08	**PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**	1.897.970.000	1.672.124.586	
2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	230.000.000	220.071.500	Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempu-an dan Perlindungan Anak
2.08.02.2.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	230.000.000	220.071.500	
2.08.02.2.02.0002	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	230.000.000	220.071.500	

Lanjutan tabel 4.2

URUSAN PEMERINTAH BIDANG PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		ANGGARAN 2024		OPD PELAKSANA
		RENCANA (Rp)	REALISASI (Rp)	
(1)		(2)	(3)	(4)
2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	167.970.000	95.815.370	Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempu-an dan Perlindungan Anak
2.08.03.2.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	92.305.000	62.394.370	
2.08.03.2.02.0001	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	92.305.000	62.394.370	
2.08.03.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	75.665.000	33.421.000	
2.08.03.2.03.0003	Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	75.665.000	33.421.000	
2.08.04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	1.500.000.000	1.356.237.716	Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempu-an dan Perlindungan Anak
2.08.04.2.01	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.500.000.000	1.356.237.716	
2.08.04.2.01.0003	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	1.500.000.000	1.356.237.716	

Lanjutan tabel 4.2

URUSAN PEMERINTAH BIDANG PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		ANGGARAN 2024		OPD PELAKSANA
		RENCANA (Rp)	REALISASI (Rp)	
(1)		(2)	(3)	(4)
2.09	**PANGAN**	149.073.475	138.641.200	
2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	149.073.475	138.641.200	Dinas Pertanian
2.09.03.2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan perkapita/thn sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	149.073.475	138.641.200	
2.09.03.2.04.0002	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	149.073.475	138.641.200	
	➢ bantuan bibit tanaman	67.003.750	60.145.000	
2.11	**LINGKUNGAN HIDUP**	237.220.750	216.358.237	
2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	237.220.750	216.358.237	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah	237.220.750	216.358.237	
2.11.11.2.01.0004	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	237.220.750	216.358.237	
2.12	**ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL**	427.586.800	278.375.100	
2.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	203.236.150	144.081.050	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.02.2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	203.236.150	144.081.050	
2.12.02.2.01.0001	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	13.660.100	12.550.750	
2.12.02.2.01.0002	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	189.576.050	131.530.300	

Lanjutan tabel 4.2

URUSAN PEMERINTAH BIDANG PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		ANGGARAN 2024		OPD PELAKSANA
		RENCANA (Rp)	REALISASI (Rp)	
(1)		(2)	(3)	(4)
2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	79.997.950	63.094.050	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.03.2.01	Pelayanan Pencatatan Sipil	79.997.950	63.094.050	
2.12.03.2.01.0001	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	40.147.950	34.126.050	
2.12.03.2.01.0002	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	39.850.000	28.968.000	
2.12.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	88.096.000	18.600.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.04.2.01	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	88.096.000	18.600.000	
2.12.04.2.01.0002	Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	20.006.800	18.600.000	
2.12.04.2.03.0008	Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan	68.089.200	0	
2.12.05	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	56.256.700	52.600.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.05.2.01	Penyusunan Profil Kependudukan	56.256.700	52.600.000	
2.12.05.2.01.0001	Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota	56.256.700	52.600.000	
2.13	**PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**	4.304.991.154	3.873.643.556	
2.13.02	PROGRAM PENATAAN DESA	299.991.582	299.991.582	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2.13.02.2.01	Penyelenggaraan Penataan Desa	299.991.582	299.991.582	
2.13.02.2.01.0006	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	299.991.582	299.991.582	

Lanjutan tabel 4.2

URUSAN PEMERINTAH BIDANG PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		ANGGARAN 2024		OPD PELAKSANA
		RENCANA (Rp)	REALISASI (Rp)	
(1)		(2)	(3)	(4)
2.13.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	2.794.999.792	2.545.839.434	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2.13.04.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	2.794.999.792	2.545.839.434	
2.13.04.2.01.0001	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	2.444.999.841	2.297.114.549	
2.13.04.2.01.0004	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	150.000.000	132.348.800	
2.13.04.2.01.0013	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	199.999.951	116.376.085	
2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	1.209.999.780	1.027.812.540	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2.13.05.2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.209.999.780	1.027.812.540	
2.13.05.2.01.0005	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	210.000.000	173.287.040	
2.13.05.2.01.0009	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	999.999.780	854.525.500	

Lanjutan tabel 4.2

URUSAN PEMERINTAH BIDANG PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		ANGGARAN 2024		OPD PELAKSANA
		RENCANA (Rp)	REALISASI (Rp)	
(1)		(2)	(3)	(4)
2.14	**PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**	3.333.000.000	3.329.370.000	
2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	3.333.000.000	3.329.370.000	Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempu-an dan Perlindungan Anak
2.14.04.2.02	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kab/Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	3.333.000.000	3.329.370.000	
2.14.04.2.02.0006	Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	3.333.000.000	3.329.370.000	
2.16	**KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**	418.000.000	416.463.721	
2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	418.000.000	416.463.721	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	418.000.000	416.463.721	
2.16.02.2.01.0004	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	130.000.000	128.463.721	
2.16.02.2.01.0005	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	288.000.000	288.000.000	

Lanjutan tabel 4.2

URUSAN PEMERINTAH BIDANG PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		ANGGARAN 2024		OPD PELAKSANA
		RENCANA (Rp)	REALISASI (Rp)	
(1)		(2)	(3)	(4)
2.17	**KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH**	862.500.000	439.795.162	
2.17.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	280.000.000	103.018.450	Dinas Koperasi UKM, Perindustrian, dan Perdagangan
2.17.07.2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	280.000.000	103.018.450	
2.17.07.2.01.0003	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	50.000.000	18.324.500	
2.17.07.2.01.0004	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	180.000.000	80.600.500	
2.17.07.2.01.0014	Penyusunan Basis Data Usaha Mikro	50.000.000	4.093.450	
2.17.08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	582.500.000	336.776.712	Dinas Koperasi UKM, Perindustrian, dan Perdagangan
2.17.08.2.01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	582.500.000	336.776.712	
2.17.08.2.01.0002	Pengembangan Usaha Mikro	582.500.000	336.776.712	

Lanjutan tabel 4.2

URUSAN PEMERINTAH BIDANG PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		ANGGARAN 2024		OPD PELAKSANA
		RENCANA (Rp)	REALISASI (Rp)	
(1)		(2)	(3)	(4)
2.18	**PENANAMAN MODAL**	216.748.000	134.518.525	
2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	216.748.000	134.518.525	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	216.748.000	134.518.525	
2.18.04.2.01.0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	216.748.000	134.518.525	
2.20	**STATISTIK**	197.931.181	173.306.500	
2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	197.931.181	173.306.500	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.20.02.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	197.931.181	173.306.500	
2.20.02.2.01.0002	Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	147.931.181	147.715.000	
2.20.02.2.01.0010	Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia	50.000.000	25.591.500	

Lanjutan tabel 4.2

URUSAN PEMERINTAH BIDANG PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		ANGGARAN 2024		OPD PELAKSANA
		RENCANA (Rp)	REALISASI (Rp)	
(1)		(2)	(3)	(4)
2.22	**KEBUDAYAAN**	**319.275.000**	**316.919.491**	
2.22.05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	319.275.000	316.919.491	Dinas Pariwisata-Ekraf, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga
2.22.05.2.02	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	319.275.000	316.919.491	
2.22.05.2.02.0003	Pemanfaatan Cagar Budaya	319.275.000	316.919.491	
2.23	**PERPUSTAKAAN**	**74.088.000**	**74.088.000**	
2.23.02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	74.088.000	74.088.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2.23.02.2.02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	74.088.000	74.088.000	
2.23.02.2.02.0004	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	74.088.000	74.088.000	
3.25	**KELAUTAN DAN PERIKANAN**	**6.556.836.925**	**3.466.384.882**	
3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	1.484.815.925	799.360.000	Dinas Perikanan
3.25.03.2.01	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kab/ Kota	1.174.815.925	769.033.000	
3.25.03.2.01.0002	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	1.174.815.925	769.033.000	
3.25.03.2.02	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kab./Kota	310.000.000	30.327.000	
3.25.03.2.02.0001	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	60.000.000	19.475.000	

Lanjutan tabel 4.2

URUSAN PEMERINTAH BIDANG PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		ANGGARAN 2024		OPD PELAKSANA
		RENCANA (Rp)	REALISASI (Rp)	
(1)		(2)	(3)	(4)
3.25.03.2.02.0002	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	150.000.000	10.852.000	
3.25.03.2.02.0003	Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	100.000.000	0	
3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	1.917.021.000	1.720.941.229	Dinas Perikanan
3.25.04.2.02	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	635.400.000	609.849.820	
3.25.04.2.02.0001	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	600.400.000	589.277.820	
3.25.04.2.02.0004	Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	35.000.000	20.572.000	
3.25.04.2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	1.281.621.000	1.111.091.409	
3.25.04.2.04.0003	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kab./Kota	1.281.621.000	1.111.091.409	
3.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	3.155.000.000	1.372.385.051	Dinas Perikanan
3.25.06.2.02	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	500.000.000	426.301.398	
3.25.06.2.02.0001	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	500.000.000	426.301.398	

Lanjutan tabel 4.2

URUSAN PEMERINTAH BIDANG PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		ANGGARAN 2024		OPD PELAKSANA
		RENCANA (Rp)	REALISASI (Rp)	
(1)		(2)	(3)	(4)
3.25.06.2.03	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kab/ Kota	2.655.000.000	946.083.653	
3.25.06.2.03.0001	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kab./Kota	200.000.000	157.290.450	
3.25.06.2.03.0002	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kab./Kota	2.455.000.000	788.793.203	
3.26	**PARIWISATA**	904.324.470	666.737.122	
3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	387.600.242	247.389.457	Dinas Pariwisata-Ekraf, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga
3.26.02.2.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	387.600.242	247.389.457	
3.26.02.2.03.0006	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	387.600.242	247.389.457	
3.26.03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	49.370.593	49.364.300	Dinas Pariwisata-Ekraf, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga
3.26.03.2.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	49.370.593	49.364.300	
3.26.03.2.01.0003	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	49.370.593	49.364.300	

Lanjutan tabel 4.2

URUSAN PEMERINTAH BIDANG PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		ANGGARAN 2024		OPD PELAKSANA
		RENCANA (Rp)	REALISASI (Rp)	
(1)		(2)	(3)	(4)
3.26.05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	467.353.635	369.983.365	Dinas Pariwisata-Ekraf, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga
3.26.05.2.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	287.019.190	238.475.051	
3.26.05.2.01.0006	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	287.019.190	238.475.051	
3.26.05.2.02	Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	180.334.445	131.508.314	
3.26.05.2.02.0001	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	180.334.445	131.508.314	
3.27	**PERTANIAN**	25.998.933.946	24.447.216.272	
3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	23.575.043.000	23.575.043.000	
3.27.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	23.575.043.000	23.575.043.000	
3.27.02.2.01.0001	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	3.303.318.000	2.493.582.000	
	➢ bantuan mesin perajang tembakau	283.500.000	193.500.000	
	➢ bantuan sepeda motor roda 3	226.125.000	163.500.000	
	➢ bantuan handtraktor	644.638.500	483.310.000	
	➢ bantuan pupuk ZK	230.000.000	190.000.000	
	➢ bantuan pupuk SP36	184.275.000	91.000.000	

Lanjutan tabel 4.2

URUSAN PEMERINTAH BIDANG PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		ANGGARAN 2024		OPD PELAKSANA
		RENCANA (Rp)	REALISASI (Rp)	
(1)		(2)	(3)	(4)
	➢ bantuan pupuk ZA	668.272.000	396.000.000	
3.27.02.2.01.0002	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	20.271.725.000	19.831.647.500	
	➢ bantuan pupuk hayati cair	5.216.725.000	5.165.292.500	
	➢ bantuan pupuk organik cair	14.695.000.000	14.386.405.000	
	➢ bantuan hand sprayer	53.025.000	24.950.000	
	➢ bantuan traktor roda 2	306.975.000	255.000.000	
3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	211.890.000	159.800.000	
3.27.05.2.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	211.890.000	159.800.000	
3.27.05.2.01.0001	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	179.625.000	129.400.000	
	➢ bantuan pupuk NPK	77.625.000	32.500.000	
	➢ bantuan rumah burung hantu	102.000.000	96.900.000	
3.27.05.2.01.0002	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	32.265.000	30.400.000	
	➢ bantuan hand sprayer	9.720.000	8.800.000	
	➢ bantuan pemotong rumput	22.545.000	21.600.000	

Lanjutan tabel 4.2

URUSAN PEMERINTAH BIDANG PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		ANGGARAN 2024		OPD PELAKSANA
		RENCANA (Rp)	REALISASI (Rp)	
(1)		(2)	(3)	(4)
3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	2.212.000.946	1.962.186.772	
3.27.07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	2.212.000.946	1.962.186.772	
3.27.07.2.01.0002	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	2.212.000.946	1.962.186.772	
	➢ bantuan pupuk SP36	47.385.000	23.400.000	
	➢ bantuan pupuk ZK	41.400.000	34.200.000	
	➢ kursus singkat petani tembakau	80.000.000	80.000.000	
3.30	**PERDAGANGAN**	100.000.000	60.219.660	
3.30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	100.000.000	60.219.660	Dinas Koperasi UKM, Perindustrian, dan Perdagangan
3.30.04.2.02	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	100.000.000	60.219.660	
3.30.04.2.02.0002	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	100.000.000	60.219.660	

Lanjutan tabel 4.2

URUSAN PEMERINTAH BIDANG PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		ANGGARAN 2024		OPD PELAKSANA
		RENCANA (Rp)	REALISASI (Rp)	
(1)		(2)	(3)	(4)
3.31	**PERINDUSTRIAN**	100.000.000	60.219.660	
3.31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	75.000.000	45.506.046	Dinas Koperasi UKM, Perindustrian, dan Perdagangan
3.31.02.2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	75.000.000	45.506.046	
3.31.02.2.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	75.000.000	45.506.046	
4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**	7.695.399.894	6.723.765.600	
4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	7.695.399.894	6.723.765.600	Bagian Kesejateraan Rayat (Sekda)
4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	7.695.399.894	6.723.765.600	
4.01.02.2.02.0001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	7.695.399.894	6.723.765.600	
5.01	**PERENCANAAN**	855.811.820	640.095.842	
5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	855.811.820	640.095.842	
5.01.03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	408.998.600	317.426.910	Bappeda Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
5.01.03.2.01.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	408.998.600	317.426.910	

Lanjutan tabel 4.2

URUSAN PEMERINTAH BIDANG PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		ANGGARAN 2024		OPD PELAKSANA
		RENCANA (Rp)	REALISASI (Rp)	
(1)		(2)	(3)	(4)
5.01.03.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	166.813.220	50.921.530	Bappeda Bidang Perekonomian dan SDA
5.01.03.2.02.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	166.813.220	50.921.530	
5.01.03.2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	280.000.000	271.747.402	Bappeda Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan
5.01.03.2.03.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	130.000.000	129.933.505	
5.01.03.2.03.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	150.000.000	141.813.897	
7.01	**KECAMATAN**	208.631.712	206.522.160	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	96.990.222	94.999.404	
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	76.019.944	74.109.840	
7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	76.019.944	74.109.840	Kec Benjeng, dan Kec Dudusampean
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	20.970.278	20.889.564	
7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	20.970.278	20.889.564	Kec Driyorejo

Lanjutan tabel 4.2

URUSAN PEMERINTAH BIDANG PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		ANGGARAN 2024		OPD PELAKSANA
		RENCANA (Rp)	REALISASI (Rp)	
(1)		(2)	(3)	(4)
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	111.641.490	111.522.756	
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	111.641.490	111.522.756	
7.01.06.2.01.0016	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	111.641.490	111.522.756	Kec Gresik, Kec Kebomas, Kec Manyar, Kec Cerme, Kec Wringinanom, Kec Panceng, Kec Bungah, Kec Dukun, dan Kec Tambak

Sumber: *Sekretariat TKPK Kabupaten Gresik*

4.2. Capaian Kinerja Indikator Makro Penanggulangan Kemiskinan (Kemiskinan Konsumsi).

Capaian kinerja makro adalah dengan melihat perkembangan Garis Kemiskinan (GK), Jumlah Penduduk Miskin, Persentase Penduduk Misin (P0), Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1), dan indeks keparahan (P2), serta Kemiskinan Ekstrem (KE).

4.2.1. Garis Kemiskinan (GK).

Garis kemiskinan adalah standar minimun rata-rata pengeluaran minimum (dalam Rupiah) per kapita per bulan untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan (konsumsi minimum). Besaran rupiah tersebut merupakan kumpulan titik potong (*cut off points*) dari kelompok miskin dan tidak miskin.

Perkembangan garis kemiskinan Kabupaten Gresik selama tahun 2020-2024 adalah sebagaima-na disajikan oleh gambar 4.1 yang menampilkan bahwa Garis Kemiskinan Kabupaten Gresik selama tahun 2020-2024 terus meningkat.

Gambar 4.1
Perkembangan Garis Kemiskinan Kabupaten Gresik, Tahun 2020-2024

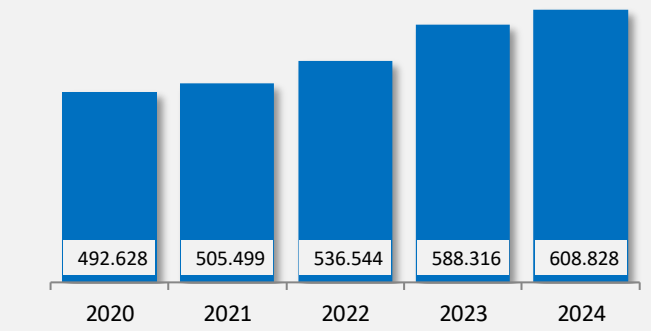

Sumber: *Publikasi BPS – data diolah.*

Selama periode tersebut Garis Kemiskinan di Kabupaten Gresik naik sekitar 116,2 ribu rupiah yaitu dari Rp. 492.628 per kapita per bulan pada tahun 2020 menjadi sebesar Rp. 608.828 per kapita per bulan di tahun 2024.

Karena perkembangan rata-rata harga kebutuhan makanan dan harga kebutuhan bukan makanan dari tahun ke tahun umumnya senantiasa meningkat, maka perkembangan garis kemiskinan dari tahun ke tahun juga meningkat.

4.2.2. Jumlah Penduduk Miskin.

Penduduk miskin yaitu penduduk yang kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar minimum (konsumsi minimun), baik kebutuhan dasar makanan dan kebutuhan dasar bukan makanan per bulan di bawah garis kemiskinan.

Berdasarkan besaran garis kemiskinan di kabupaten Gres, maka dapat diketahui bahwa pada tahun 2024 jumlah penduduk miskin Kabupaten Gresik adalah sebanyak 142.380 jiwa. Jumlah ini turun sebanyak 7.370 jiwa (4,92%) dibandingkan jumlah penduduk miskin pada tahun 2023. Sementara itu, perkembangan jumlah penduduk miskin di Kabupaten Gresik selama kurun waktu tahun 2020-2024 adalah sebagaimana disajikankan pada gambar grafik berikut.

Gambar 4.2
Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Gresik

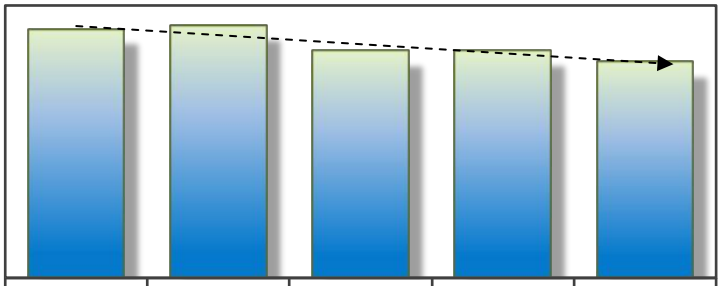

	2020	2021	2022	2023	2024
Penduduk Miskin (Jiwa)	164.050	166.350	149.640	149.750	142.380

Sumber*: Publikasi BPS – data di olah*

Berdasarkan gambar di atas, nampak bahwa perkembangaan jumlah penduduk Kabupaten Gresik selama 5 tahun terakhir menampilkan pola perkembangaan dengan kecenderungan *trend* yang menurun.

4.2.3. Persentase Penduduk Miskin (P0).

Dengan jumlah penduduk miskin Kabupaten Gresik pada tahun 2024 yang sebanyak 142.280 jiwa, maka persentase penduduk miskinnya sebesar 10,32 persen. Persentase ini turun dengan penurunan sebesar 0,64 persen poin terhadap persentase penduduk miskin di tahun 2023.

Sebagaimana dengan *trend* perkembangaan jumlah penduduk miskin, pola perkembangaan persentase penduduk miskin selama kurun waktu 5 (lima) tahun ke belakang masih menampilkan pola perkembangaan dengan kecenderungan *trend* yang menurun.

Gambar 4.3
Perkembangan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Gresik

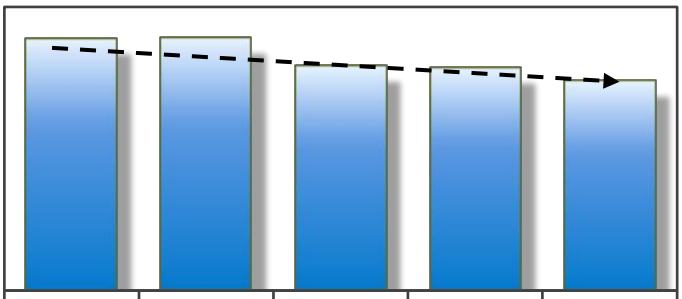

	2020	2021	2022	2023	2024
% Penduduk Miskin	12,40	12,42	11,06	10,96	10,32

Sumber : *Publikasi BPS – data di olah*

Bila melihat persentase penduduk miskin di Provinsi Jawa Timur sebesar 9,79 persen, sedangkan persentase penduduk miskin secara Nasional adalah sebesar 9,03 persen, maka persentase penduduk miskin Kabupaten Gresik tidak lebih baik, karena masih lebih tinggi terhadap persentase penduduk miskin di Provinsi Jawa Timur dan Nasional. Dengan kata lain persentase penduduk miskin Kabupaten Gresik pada tahun 2024 berada pada kategori tinggi. Sementara itu berdasar RPJMD 2021-2026 yang menetapkan tingkat kemiskinan Kabupaten Gresik tahun 2024 sebesar 10,00–9,70 persen, maka dapat dinyatakan bahwa capaian kinerja persentase penduduk miskin hampir mencapai target RPJMD.

Gambar 4.4
Posisi Relatif Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Gresik terhadap Provinsi Jawa Timur dan Nasional, Tahun 2024

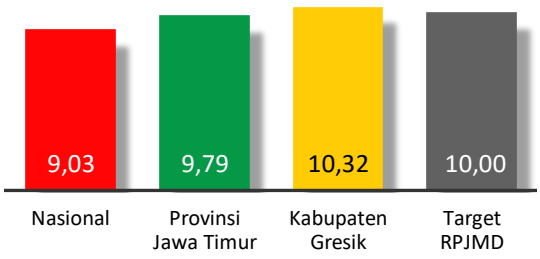

Sumber : *Publikasi BPS – data di olah`*

Posisi relatif persentase penduduk miskin Kabupaten Gresik yang lebih tinggi terhadap Provinsi dan Nasional sudah terjadi sejak puluhan tahun yang lalu, hal ini karena baseline yang digunakan pada tahun 2003 memang sudah menempatkan angka kemiskinan Kabupaten Gresik pada posisi sangat tinggi. Sebagai perbandingan, tahun 2003 persentase penduduk miskin Kabupaten Gresik adalah sebesar 23,20 persen, sementara Provinsi Jawa Timur sebesar 20,93 persen, dan Nasional sebesar 17,42 persen.

4.2.4. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1).

Indeks kedalaman kemiskinan merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan, dimana semakin tinggi nilai indeks, maka semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan.

Capaian nilai indeks kedalaman kemiskinan di Kabupaten Gresik untuk tahun 2024 adalah sebesar 1,58 persen. Nilai capaian ini turun terhadap capaian di tahun 2023 yang sebesar 1,63 persen. Dengan turunnya nilai indeks kedalaman kemiskinan mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin di Kabupaten Gresik cenderung semakin menjauhi garis kemiskinan sehingga ketimpangan pengeluaran penduduk miskin untuk memenuhi kebutuhan dasar hidupnya juga semakin kecil.

Gambar 4.5
Perkembangan Indeks Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Gresik

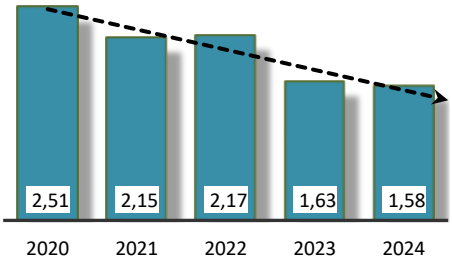

Sumber : *Publikasi BPS – data di olah*

Bila melihat pola perkembangan antar waktu pada 5 tahun terakhir (tahun 2020-2024), perkembangan nilai indeks kedalaman kemiskinan Kabupaten Gresik menampilkan pola perkembangan dengan ke-cenderungan *trend* menurun.

Pada tahun 2024 indeks kedalaman kemiskinan di Provinsi Jawa Timur adalah sebesar 1,48 persen sementara itu indeks kedalaman kemiskinan secara Nasional adalah sebesar 1,46 persen. Dengan demikian indeks kedalaman kemiskinan Kabupaten Gresik berada pada kategori tinggi, hal ini karena capaian indeks kedalaman ke-miskinannya masih lebih tinngi terhadap capaian indeks kedalaman kemiskinan di Provinsi Jawa Timur dan indeks kedalaman kemiskinan secara Nasional.

Gambar 4.6
Posisi Relatif Indeks Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Gresik terhadap Provinsi Jawa Timur dan Nasional, Tahun 2024

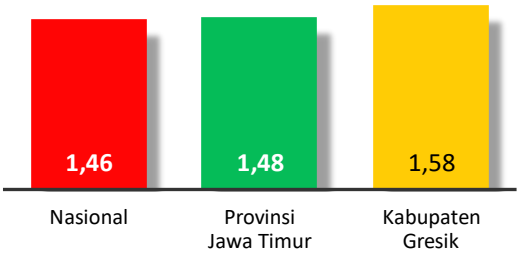

Sumber: *Publikasi BPS – data di olah*

4.2.5. Indeks Keparahan Kemiskinan (P2).

Indeks keparahan kemiskinan merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran antar penduduk miskin terhadap garis kemiskinan, dimana

semakin tinggi nilai indeks, maka semakin jauh rata-rata pengeluaran antar penduduk miskin dari garis kemiskinan.

Gambar 4.7.
Perkembangan Indeks Keparahan Kemiskinan Kabupaten Gresik

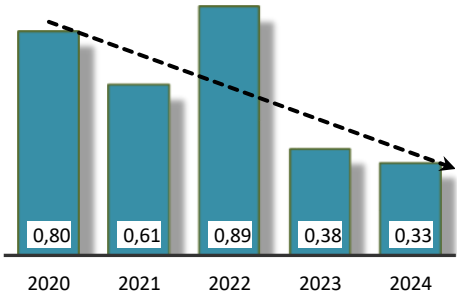

Sumber *: Publikasi BPS – data di olah*

Capaian kinerja indeks keparahan kemiskinan di Kabupaten Gresik untuk tahun 2024 adalah sebesar 0,33 persen. Nilai capaian ini turun terhadap capaian di tahun 2023 yang sebesar 0,38 persen. Dengan turunnya nilai indeks keparahan kemiskinan mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran antar penduduk miskin Kabupaten Gresik cenderung se-makin mengecil, sehinnga ketim-pangan rata-rata pengeluaran antar penduduk miskin untuk memenuhi kebutuhan dasar hidupnya juga semakin homogen.

Sebagaimana indeks kedalaman kemiskinan, pada indeks keparahan kemiskinan juga masih menampilkan pola perkembangan antar waktu pada 5 tahun terakhir (tahun 2020-2024) dengan kecenderungan *trend* menurun.

Pada tahun 2024 indeks keparahan kemiskinan di Provinsi Jawa Timur adalah sebesar 0,31 persen sedangkan indeks keparahan kemiskinan secara Nasional adalah sebesar 0,35 persen. Dengan demikian indeks keparahan kemiskinan Kabupaten Gresik berada pada kategori sedang,

karena nilai indeks keparahan kemiskinan Kabupaten Gresik berada diantara capaian nilai indeks keparahan kemiskinan Provinsi Jawa Timur maupun Nasional.

Gambar 4.8
Posisi Relatif Indeks Keparahan Kemiskinan Kab. Gresik terhadap Provinsi dan Nasional, Tahun 2024

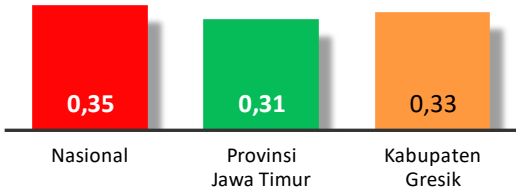

Sumber: *Publikasi BPS – data di olah*

4.2.6. Kemiskinan Ekstrem (KE).

Sejak tahun 2020 Pemerintah Republik Indonesia telah menetapkan kebijakan untuk menurunkan angka kemiskinan ekstrem hingga 0 persen pada tahun 2024. Kemiskinan ekstrem adalah kondisi ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar yaitu kebutuhan makanan, air minum bersih, sanitasi layak, kesehatan, tempat tinggal, pendidikan, dan akses informasi yang tidak hanya terbatas pada pendapatan, tapi juga akses pada layanan sosial (*United Nations*, 1996). Indikator kemiskinan ekstrem adalah penduduk yang berpendapatan di bawah US$1,91 PPP (*purchasing power parity*) per kapita per hari. PPP didefinisikan sebagai jumlah unit mata uang yang diperlukan untuk membeli barang dan jasa yang umum yang dapat dibeli oleh satu unit mata uang umum/referensi. PPP ditentukan menggunakan "*absolute poverty measure*" yang konsisten antar negara dan antar waktu. Dengan kata lain, seseorang dikategori-kan miskin ekstrem jika pengeluarannya

di bawah Rp. 10.739/orang/hari atau Rp. 322.170/orang/bulan (BPS, 2021).

Perkembangan angka kemiskinan ekstrem Kabupaten Gresik terhadap Provinsi Jawa Timur dan Nasional selama tahun 2020-2024 adalah sebagaimana disajikan pada gambar grafik berikut.

Gambar 4.9
Perkembangan Angka Kemiskinan Ekstrem Kabupaten Gresik terhadap Provinsi Jawa Timur dan Naional.

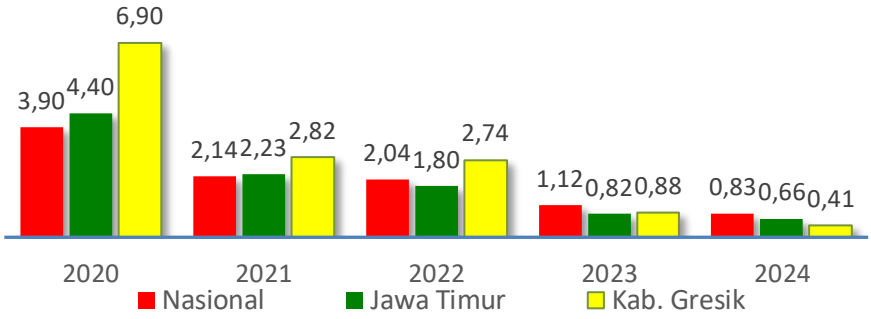

Sumber: *BPS, Susenas - data diolah*

Berdasarkan gambar di atas, nampak bahwa angka kemiskinan ekstrem Kabupaten Gresik pada tahun 2024 sudah lebih kecil dari capaian Provinsi dan Nasional, dan penurunan angka kemiskinan ekstrem Kabupaten Gresik selama tahun 2020-2024 lebih besar dibandingkan penurunan angka kemiskinan ektrem Provinsi maupun Nasional. Dimana angka kemiskinan ekstrem Kabupaten Gresik selama periode tersebut turun sebesar 6,49 persen poin, sedangkan Provinsi Jawa Timur turun sebesar 3,74 persen poin, sementara angka kemiskinan ekstrem Nasional turun sebesar 3,07 persen poin.

Dari seluruh uraian capaian kinerja pada Persentase Penduduk Miskin (P0), Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1), dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) di atas, diperoleh data-data perkembangan capaian kinerja sebagaimana disajilkan pada tabel berikut.

Tabel 4.3
Perkembangan Capaian Kinerja P0, P1, P2, dan Kemiskinan Ekstrem Kabupaten Gresik

Indikator	Sat	Capaian Kinerja Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Jumlah Penduduk Miskin	jiwa	164.050	166.350	149.640	149.750	142.380
Persentase Penduduk Miskin (P0)	%	12,40	12,42	11,06	10,96	10,32
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	%	2,51	2,15	2,17	1,63	1,58
Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)	%	0,80	0,61	0,89	0,38	0,33
Kemiskinan Ekstrem	%	6,90	2,82	2,74	0,88	0,41

Sumber: *Publikasi BPS, Susenas – data di olah*

Berdasarkan tabel di atas, menunjukkan bahwa penurunan persentase penduduk miskin pada tahun 2024 diikuti dengan menurunnya nilai indeks kedalaman kemiskinan dan indeks keparahan kemiskinan. Hal ini mengindikasikan bahwa kinerja program-program penanggulangan kemiskinan, baik itu program Nasional, Provinsi, maupun program penanggulangan kemiskinan Kabupaten Gresik di tahun 2023 selain mampu memperkecil persentase penduduk miskin (meski tidak dalam

hal jumlah penduduk miskin), juga berhasil mengangkat keterpurukan penduduk miskin dari jurang kemiskinan (yaitu penduduk miskin tertinggal semakin mendekati garis kemiskinan) serta mengurangi kesenjangan kemiskinan antar penduduk miskin (masalah yang dihadapi antar penduduk miskin semakin heterogen).

4.3. Capaian Kinerja Indikator Tahunan terkait Isu Kemiskinan (Kemiskinan Non Konsumsi).

Untuk mengetahui capaian kinerja tahunan terkait isu kemiskinan adalah dengan melihat perkembangan kinerja pada indikator-indikator bidang pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, indikator infrastruktur dasar rumah tangga, dan indikator bidang Ketahanan Pangan. Indikator-indikator tersebut dianalisis capaian kinerjanya di tahun 2024 terhadap capaian di tingkat Provinsi Jawa Timur dan capaian secara Nasional, pada tahun yang sama. Selain itu indikator-indikator tersebut disajikan dalam deret waktu tahun 2020-2024 untuk dilakukan analisis pada pola perkembangan antar waktunya.

4.3.1. Capaian Kinerja Indikator Tahunan terkait Isu Kemiskinan Kabupaten Gresik terhadap Provinsi dan Nasional.

Capaian kinerja indikator tahunan terkait isu kemiskinan di Kabupaten Gresik pada tahun 2024 apabila disandingkan dengan capaian di tingkat

Provinsi Jawa Timur dan capaian secara Nasional pada tahun yang sama adalah sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

Tabel 4.4

Capaian Kinerja Indikator Tahunan terkait Isu Kemiskinan Kabupaten Gresik terhadap Provinsi dan Nasional, Tahun 2024

Dimensi / Indikator	Sat	Capaian Kinerja		
		Kabupaten Gresik	Provinsi Jawa Timur	Nasional
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Pendidikan:				
▪ APM SD/MI sederajat	%	97,10	98,81	97,94
▪ APM SMP/MTs sederajat	%	91,53	84,52	81,73
▪ APM SMA/SMKMA sederajat	%	74,89	64,77	64,32
▪ APtS usia 7-12 tahun	%	0,06	0,72	1,34
▪ APtS usia 13-15 tahun	%	0,39	2,36	4,14
▪ APtS usia 16-18 tahun	%	2,92	25,93	27,13
▪ Rata-rata lama sekolah	th.	10,03	8,28	8,85
▪ Harapan lama sekolah	th.	13,98	13,13	13,21
▪ AMH penduduk usia 15^{+}	%	98,33	93,37	96,29
Kesehatan:				
▪ AKN /1000 KH		3,80	7,37	8,05
▪ AKB /1000 KH		4,30	2,44	3,44
▪ AKBA /1000 KH		4,40	93,34	110,64
▪ AKI /100.000 KH		77,59	0,65	0,80
▪ Balita gizi buruk	%	0,29	4,76	4,70
▪ Balita gizi kurang	%	4,47	6,30	7,06
▪ Balita stunting	%	5,32	99,54	90,63
▪ Imunisasi dasar lengkap	%	98,80	99,03	96,81
▪ Persalinan di Fasyankes	%	83,30	78,79	122,87
▪ Rasio Bidan /100 ribu pend.		90,00	75,07	74,15
▪ Usia harapan hidup	th.	74,48	7,37	8,05

Lanjutan tabel 4.4

Dimensi / Indikator	Sat	Capaian Kinerja		
		Kabupaten Gresik	Provinsi Jawa Timur	Nasional
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Ketenagakerjaan:				
▪ TPAK	%	71,61	73,45	70,69
▪ TPT	%	6,45	4,88	4,91
▪ Penduduk usia *idle*	%	22,82	19,86	20,03
Infrastruktur Dasar:				
▪ Akses air minum layak	%	99,17	96,93	92,64
▪ Akses sanitasi layak	%	93,87	85,56	83,60
▪ Akses listrik rumah tangga	%	100,00	99,94	99,48
▪ Status rumah milik sendiri	%	91,48	90,93	84,95
▪ Rumah tidak layak huni	%	17,14	29,26	36,85
Ketahanan Pangan:				
▪ PoU	%	2,90	8,40	8,27
▪ Produktivitas padi	ku/ha	62,30	57,33	52,90
▪ Rata-rata harga bahan pokok	Rp/kg	naik	naik	naik

Keterangan:
Capaian Kabupaten lebih baik dari Provinsi dan Nasional.
Capaian Kabupaten diantara capaian Provinsi dan Nasional.
Capaian Kabupaten lebih buruk dari Provinsi dan Nasional.

Sumber*: di olah dari berbagai sumber*

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa:

a) Pada dimensi pendidikan dari 9 (sembilan) indikator yag ditampilkan menunjukkan bahwa hanya indikator APM SD/MI sederajat yang menunjukkan capaian kinerja lebih buruk (berlabel MERAH) terhadap capaian di tingkat Provinsi maupun secara Nasional. Indikator ini perlu menjadi priotitas perhatian perbaikan kinerja ke depan.

Sementara itu untuk indikator-indikator yang lain telah menunjukkan capaian kinerja yang lebih baik (berlabel HIJAU) dibanding capaian Provinsi maupun Nasional.

b) Pada dimensi kesehatan, dari 11 (sebelas) indikator yang ditampilkan, terdapat 2 (dua) indikator dengan label MERAH yaitu indikator AKBA; dan indikator Persalinan dilakukan di Fasyankes, kedua indikator ini menunjukkan capaian kinerja yang lebih buruk terhadap capaian kinerja Provinsi Jawa Timur maupun Nasional. Sedangkan 3 (tiga) indikator yaitu indikator Imunisasi Dasar Lengkap pada Balita; Rasio Bidan; dan indikator UHH menunjukkan capaian kinerja diantara capaian tingkat Provinsi Jawa Timur dan Nasional (berlabel KUNING).

   Sementara itu untuk indikator-indikator yang lain telah menunjukkan capaian kinerja yang lebih baik (berlabel HIJAU) dibanding capaian Provinsi maupun Nasional.

c) Pada dimensi ketenagakerjaan, 3 (tiga) indikator yang ditampilkan, indikator TPT; dan indilator Penduduk *Idle* menampilkan label MERAH, artinya capaian indikator ini lebih buruk/tinggi dibandingkan Provinsi dan Nasional. Sementara itu untuk indikator TPAK berlabel KUNING.

   Seluruh indikator pada dimensi ketenagakerjaan perlu mendapat perhatian guna perbaikan capaian di masa mendatang.

d) Pada dimensi infrastruktur dasar rumah tangga, dari 5 (lima) indikator yang ditampilkan, seluruhnya telah menunjukkan hasil capaian kinerja yang lebih baik (berlabel HIJAU) terhadap Provinsi dan Nasional.

e) Pada dimensi ketahanan pangan, indikator Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (PoU), dan indikator Produktivitas Padi menunjukkan hasil dengan label HIJAU, artinya capaian kineja Kabupaten sudah lebih baik dibandingkan dengan capaian di tingkat Provinsi dan Nasional.

Dari uraian analisa di atas, maka indikator-indikator dengan label merah dapat dijadikan petunjuk sebagai fokus prioritas utama dalam melakukan intervensi perbaikan di masa mendatang, sementara indikator dengan label kuning sebagai fokus prioritas berikutnya.

4.3.2. Capaian Kinerja Antar Waktu Indikator Tahunan terkait Isu Kemiskinan Kabupaten Gresik.

Data perkembangan capaian kinerja indikator-indikator tahunan terkait isu kemiskinan di Kabupaten Gresik selama kurun waktu tahun 2020-2024 adalah sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

Tabel 4.5

Perkembangan Capaian Kinerja Tahunan terkait Isu Kemiskinan
Kabupaten Gresik (Kemiskinan Non Konsumsi)

Dimensi / Indikator	Sat	Capaian Kinerja Tahun					Kinerja
		2020	2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Pendidikan:							
▪ APM SD/MI sederajat	%	98,82	99,37	97,39	97,66	97,10	
▪ APM SMP/MTs sederajat	%	83,29	83,91	84,67	81,73	91,53	
▪ APM SMA/SMK/MA	%	79,71	80,48	78,07	76,00	74,89	
▪ APtS usia 7-12 tahun	%	3,25	1,87	0,27	0,16	0,06	
▪ APtS usia 13-15 tahun	%	5,12	4,33	3,32	0,17	0,39	
▪ APtS usia 16-18 tahun	%	6,51	5,53	4,47	3,18	2,92	
▪ Rata-Rata Lama Sekolah	th.	9,30	9,56	9,75	10,01	10,03	
▪ Harapan Lama Sekolah	th.	13,73	13,77	13,96	13,97	13,98	
▪ AMH usia penduduk 15+	%	97,28	97,20	98,03	98,39	98,33	
Kesehatan:							
▪ AKN /1000 KH		2,51	3,26	4,10	4,60	3,80	
▪ AKB/1000 KH		2,66	3,47	4,34	4,80	4,30	
▪ AKBA /1000 KH		0,05	0,05	4,40	4,80	4,40	
▪ AKI /100.000 KH		59,09	315,76	94,18	99,38	77,59	
▪ Balita gizi buruk	%	0,17	0,14	0,20	0,20	0,29	
▪ Balita gizi kurang	%	3,62	3,11	5,90	3,70	4,47	
▪ Balita stunting	%	11,04	10,90	9,61	6,60	5,32	
▪ Imunisasi dasar lengkap	%	107,70	104,70	98,80	96,10	98,80	
▪ Persalinan di Fasyankes	%	93,10	90,20	89,00	88,40	83,30	
▪ Rasio Bidan /100ribu pend		67,85	88,00	75,30	86,37	90,00	
▪ Usia Harapan Hidup	th.	73,66	73,67	73,96	74,24	74,48	
Ketenagakerjaan:							
▪ TPAK	%	66,53	69,43	68,30	70,12	71,61	
▪ TPT	%	8,21	8,00	7,84	6,82	6,45	
▪ Penduduk usia *idle*	%	25,67	23,27	24,33	21,84	22,82	

Lanjutan tabel 4.5

Dimensi / Indikator	Sat	Capaian Kinerja Tahun					Kinerja
		2020	2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Infrastruktur Dasar:							
▪ Akses air minum layak	%	94,63	88,99	91,50	98,85	99,17*	
▪ Akses sanitasi layak	%	93,15	91,56	90,29	94,10	93,87*	
▪ Akses listrik	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
▪ Status rumah milik sendiri	%	85,01	90,63	93,07	93,14	91,48	
▪ Rumah tidak layak huni	%	19,75	28,70	28,00	27,90	17,14	
Ketahanan Pangan:							
▪ PoU	%	4,43	4,59	6,60	3,67	2,90	
▪ Produktivitas Padi	Ku/ha	60,84	61,84	64,98	65,72	62,30	
Perkembangan Harga:							
▪ Beras kualitas sedang	Rp/kg	9.200	9.250	9.500	10.950	12.950	
▪ Gula pasir lokal	Rp/kg	12.000	12.000	12.750	16.400	16.845	
▪ Minyak goreng curah	Rp/kg	13.800	19.000	15.000	14.500	17.926	
▪ Daging sapi lokal	Rp/kg	99.500	99.500	102.500	102.200	107.143	
▪ Daging ayam ras	Rp/kg	32.750	36.500	34.500	35.750	36.336	
▪ Telur ayam ras	Rp/kg	23.750	22.750	30.000	26.950	27.462	
▪ Cabai merah	Rp/kg	37.500	36.750	27.500	80.400	28.622	
▪ Bawang merah	Rp/kg	35.000	20.750	34.750	31.200	39.517	
▪ Bawang putih	Rp/kg	25.750	25.500	22.750	35.000	39.849	

bila capaian tahun 2023 lebih baik dari tahun 2022 dan tahun 2019;
bila capaian tahun 2023 lebih baik dari tahun 2022 tetapi lebih buruk dari tahun 2019;
bila capaian tahun 2023 lebih buruk dari tahun 2022 tetapi lebih baik dari tahun 2019;
bila capaian tahun 2023 lebih buruk dari tahun 2022 dan tahun 2019.

Sumber: *di olah dari berbagai sumber*

Berdasarkan tabel di atas:

a) pada dimensi Pendidikan, dari 9 (sembilan) indikator, indikator APM SD/MI dan indikator APM SMA/SMK/MA menunjukkan capaian kinerja tahun 2024 tidak lebih baik (lebih randah) dari capaian tahun 2023,

sekaligus menampilkan pola perkembangan antar waktu (tahun 2020-2024) dengan kecenderungan *trend* menurun/memburuk (berlabel MERAH), indikator ini perlu mendapat perhatian khusus untuk perbaikan capaian di masa mendatang.

Dua (2) indikator yaitu indikator APTs usia 13-15 tahun dan indikator AMH penduduk usia 15^{+} menunjukkan capaian tahun 2024 tidak lebih baik dari tahun sebelumnya, tetapi berdasarkan data deret waktu lima tahunan masih menampilkan pola perkembangan dengan kecende-rungan *trend* membaik (berlabel KUNING).

Untuk indikator yang lainnya disamping menunjukkan capaian tahun 2024 sudah lebih baik dari tahun sebelumnya, juga telah menampilkan pola perkembangan antar waktu dengan kecenderungan *trend* membaik.

b) dari 11 (sebelas) indikator bidang Kesehatan, 3 (tiga) indikator yaitu indikator Prevalensi Balita Gizi Buruk; Prevalensi Balita Gizi Kurang dan indikator Persalinan di Fasyankes menunjukkan capaian kinerja tahun 2024 tidak lebih baik dari tahun 2023, sekaligus menampilkan pola perkembangan antar waktu (tahun 2020-2024) dengan kecenderungan *trend* memburuk (berlabel MERAH), indikator ini perlu men dapat perhatian khusus guna perbaikan capaian di masa mendatang.

Indikator AKN; AKB; AKBa dan indikator Imunisasi Dasar Lengkap pada Balita meski telah menunjukkan capaian tahun 2024 lebih baik dari tahun sebelumnya, meski demikian berdasarkan data deret waktu lima tahunan masih menampilkan pola perkembangan antar waktu dengan kecenderungan *trend* membaik (berlabel HIJAU).

Sementara indikator Prevalensi Stunting; Rasio Bidan dan indikator UHH telah menunjukkan capaian kinerja tahun 2024 lebih baik dari tahun sebelumnya sekaligus menampilkan pola perkembangan antar waktu dengan kecenderungan *trend* yang membaik pula (berlabel BIRU).

c) pada bidang Ketenagakerjaan, dari seluruh indikator yaitu indikator TPAK dan indikator TPT, telah menunjukkan capaian kinerja tahun 2024 lebih baik dari tahun sebelumnya sekaligus menampilkan pola perkembangan antar waktu dengan kecenderungan *trend* membaik (berlabel BIRU). Sedangkan indikator Penduduk *idle* menunjukkan capaian tahun 2024 tidak lebih baik dari tahun 2023, meski demikian berdasarkan data deret waktu masih menampilkan pola perkembangan dengan kecenderungan *trend* membaik (berlabel KUNING).

d) dari 5 (lima) indikator bidang Infrastruktur Dasar Rumah Tangga, indikator Rumah tangga dengan akses Air Minum Layak; Rumah tangga dengan akses Penerangan Listrik; dan indikator RTLH telah

menunjukkan capaian kinerja tahun 2024 lebih baik dari tahun sebelumnya sekaligus menampilkan pola perkembangan antar waktu dengan kecenderungan *trend* membaik (berlabel BIRU). Sedangkan indikator Rumah tangga dengan Akses Sanitasi Layak dan indikator Rumah tangga dengan Status Milik Sendiri menunjukkan capaian tahun 2024 tidak lebih baik dari tahun 2023, meski demikian berdasarkan data deret waktu masih menampilkan pola perkem-bangan dengan kecenderungan *trend* membaik (berlabel KUNING).

e) pada bidang Ketahanan Pangan, indikator Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (PoU) telah menunjukkan capaian kinerja tahun 2024 lebih baik dari tahun sebelumnya, sekaligus menampilkan pola perkembangan antar waktu dengan kecenderungan *trend* membaik (berlabel BIRU). Sedangkan indikator Produktivitas Padi menunjukkan capaian tahun 2024 tidak lebih baik dari tahun 2023, meski demikian berdasarkan data deret waktu masih menampilkan pola perkembangan dengan kecenderungan *trend* membaik (berlabel KUNING).

   Di sisi lain, hampir seluruh rata-rata harga komoditas pangan pokok (kecuali komoditas Cabe Merah) mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya, dan dengan pola perkembangan rata-rata harga

selama tahun 2020-2024 yang cenderungan meningkat/memburuk pula.

Dari uraian analisa di atas, maka indikator-indikator dengan label merah dapat dijadikan petunjuk sebagai fokus prioritas utama dalam melakukan intervensi perbaikan di masa mendatang, sementara indikator dengan label kuning sebagai fokus prioritas berikutnya.

PEMERINTAH
KABUPATEN GRESIK

TKPK
Kabupaten Gresik

Bab 5
Penutup

LP2KD
2024

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
PENELITIAN dan PENGEMBANGAN DAERAH

5 BAB Penutup

5.1. Kesimpulan.

1. Capaian Kinerja Penanggulangan Kemiskinan:

- Pada Maret 2024, jumlah penduduk miskin Kabupaten Gresik mengalami penurunan sebanyak 7.370 jiwa dibandingkan Maret 2023, dengan pola perkembangan antar waktu selama tahun 2020-2024 cenderung menurun.
- Persentase penduduk miskin (P0) Kabupaten Gresik turun dari 10,96% pada Maret 2023 menjadi 10,32% pada Maret 2024. Pola perkembangan antar waktu persentase penduduk miskin Kabupaten Gresik selama kurun waktu tahun 2020-2024 menampilkan pola perkembangan menurun.

  Posisi relatif persentase penduduk miskin Kabupaten Gresik pada tahun 2024 masih lebih tinggi terhadap capaian Provinsi Jawa Timur maupun Nasional. Sementara itu capaian kinerja persentase penduduk miskin Kabupaten Gresik hampir mencapai target tingkat

kemiskinan tahun 2024 yang telah ditetapkan pada RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026 yaitu sebesar 10.00-9,70%.

- Indeks kedalaman kemiskinan (P1) pada Maret 2024 turun di-bandingkan dengan capaian di tahun sebelumnya. Penurunan capaian ini berarti bahwa program-program penanggulangan kemiskinan Kabupaten Gresik di tahun 2023 mampu mengurangi ketersenjangan kemampuan pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan.

  Indeks keparahan kemiskinan (P2) Kabupaten Gresik pada Maret 2024 juga turun terhadap capaian Maret 2023. Turunnya nilai indeks ini dapat menjadi indikasi bahwa program penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Gresik pada tahun 2023 juga telah mampu mencegah timbulnya kesenjangan pengeluaran antar penduduk miskin.

  Di Kabupaten Gresik, capaian indeks kedalaman kemiskinan pada tahun 2024 masih lebih tinggi terhadap capaian Provinsi Jawa Timur maupun secara Nasional, sedangkan capaian indek keparahan kemiskinannya berada diantara capaian di tingkat Provinsi Jawa Timur maupun secara Nasional.

- Capaian kinerja indikator-indikator tahunan terkait isu kemiskinan yang menunjukkan capaian kinerja negatif, baik di tinjau dari

capaian kinerja terhadap Provinsi Jawa Timur dan capaian secara Nasional (posisi relatif) maupun capaian kinerja antar waktu sehingga perlu menjadi perhatian perbaikan, adalah sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.1

Kinerja Indikator Tahunan terkait Isu Kemiskinan
dengan Capaian Kinerja yang Perlu Perhatian/Perbaikan

Dimensi / Bidang	Indikator dengan Capaian Kinerja yang Perlu Perhatian/Perbaiakan pada:	
	Posisi Relatif terhadap Provinsi dan Nasional	Perkembangan Antar Waktu
(1)	(2)	(3)
Pendidikan	▪ APM SD/Mi	▪ APM SD/MI; APM SMA/ SMK/MA ▪ APTs usia 13-15 tahun; AMH penduduk usia 15^{+}
Kesehatan	▪ AKBa; Persalinan di Fas-yankes ▪ Imunisasi Dasar Lengkap; Rasio Bidan; UHH	▪ Balita Gizi Buruk; Balita Gizi Kurang; Persalinan di Fasyankes
Ketenaga-kerjaan	▪TPT; Penduduk usia *idle* ▪TPAK	▪Penduduk usia *idle*
Infrastruktur Dasar	---	▪Akses Sanitasi Layak; RTLH
Ketahanan Pangan	---	▪Perkembangan Harga ▪Produktivitas Padi

Sumber*: Hasil analisa*

2. Program Penanggulangan Kemiskinan:

- Sudah banyak memiliki program-program yang terkait (langsung/ spesifik maupun tidak langsung/sensitif) dengan penanggulangan kemiskinan, akan tetapi:
  - Masih perlu lebih memanfaatkan memanfaatkan analisis posisi relatif dan perkembangan antar waktu dalam menentukan fokus/ prioritas masalah dan analisis kuadran untuk menentukan lokus/ prioritas wilayah dalam perencanaan program;
  - antar program masih perlu lebih menunjukkan adanya komplementaritas;
  - sudah menggunakan DTKS atau data kemiskinan daerah lainnya sebagai sumber data untuk penetapan sasaran penerima manfaat program.

3. Kelembagaan Penanggulangan Kemiskinan:

- Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) telah terbentuk melalui Surat Keputusan Bupati Gresik dan telah sesuai dengan Permendagri No. 53 Tahun 2020.
- Tata kerja TKPK telah sebagaimana Permendagri No. 53 Tahun 2020, dalam hal penyusunan dan pelaksanaan agenda kerja tahunan TKPK, meliputi: (i) rencana kerja penyusunan RPKD, (ii)

rencana kerja penyusunan RAT, dan (iii) Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan.

- Pelaksanaan monitoring-evaluasi dan penanganan pengelolaan pengaduan masih perlu dikelola secara optimal.

5.2. **Rekomendasi**.

1) Kepada pihak terkait:

Ditujukan kepada	Isi Rekomendasi
Pemerintah Kabupaten Gresik	1) memperkuat pelaksanaan penanggulangan kemiskinan dengan regulasi (Perda atau Perbup) tentang Penyelenggaraan Pengentasan Kemiskinan, dan dilengkapi pula dengan peraturan pendukung maupun petunjuk pelaksanaan. 2) mengembangkan PROGRAM INOVASI DAERAH berbasis pemberdayaan masyarakat, guna mengimbangi program-program penanggulangan kemiskinan yang selama ini telah ada dan hanya bersifat *charity*, juga sekaligus untuk mewujudkan strategi peningkatan pendapatan penduduk miskin.
Ketua TKPK	meningkatkan tata kerja TKPK sesuai Permendagri nomor 53 tahun 2020.

Ditujukan kepada	Isi Rekomendasi
Wakil Ketua TKPK	meningkatkan kuantitas dan kualitas koordinasi, sinkronisasi, harmonisasi program dan data penanggulangan kemiskinan di internal klaster maupun antar klaster
Sekretaris TKPK	1) menyusun agenda kerja TKPK sesuai Permendagri nomor 53 tahun 2020; 2) mengembangkan sistem informasi kemiskinan daerah berbasis IT; 3) memperkuat Sekretariat TKPK dengan menyediakan peralatan dan personil kesekretariatan yang memiliki kualifikasi dalam mengelola data-data kemiskinan menjadi informasi yang *up to date.* 4) optimalisasi pengelolaan pengaduan masyarakat.
Koordinator Kelompok Program	1) meningkatkan kuantitas dan kualitas koordinasi, sinkronisasi dan harmonisasi program. 2) optimalisasi pelaksanan monitoring evaluasi pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan.
Perangkat Daerah Pelaksana program	perencanaan sub kegiatan (khususnya aktivitas) memanfaatkan data kemiskinan daerah (DTKS/P3KE/ Data Kemiskinan Daerah lainnya) sehingga terpilah antara anggaran untuk program penanggulangan kemiskinan dengan program regular/umum.

2) Menjadikan sebaran kecamatan yang menjadi prioritas wilayah intervensi program penanggulangan kemiskinan (lokus program) sesuai dengan focus masalah masing-masing dimensi sebagaimana disajikan pada contoh grafik-grafik berikut ini.

Gambar 5.1

Prioritas Wilayah Intervensi Individu Miskin Ekstrim Desil 1-4
Usia 15-59 Tahun TidakBekerja

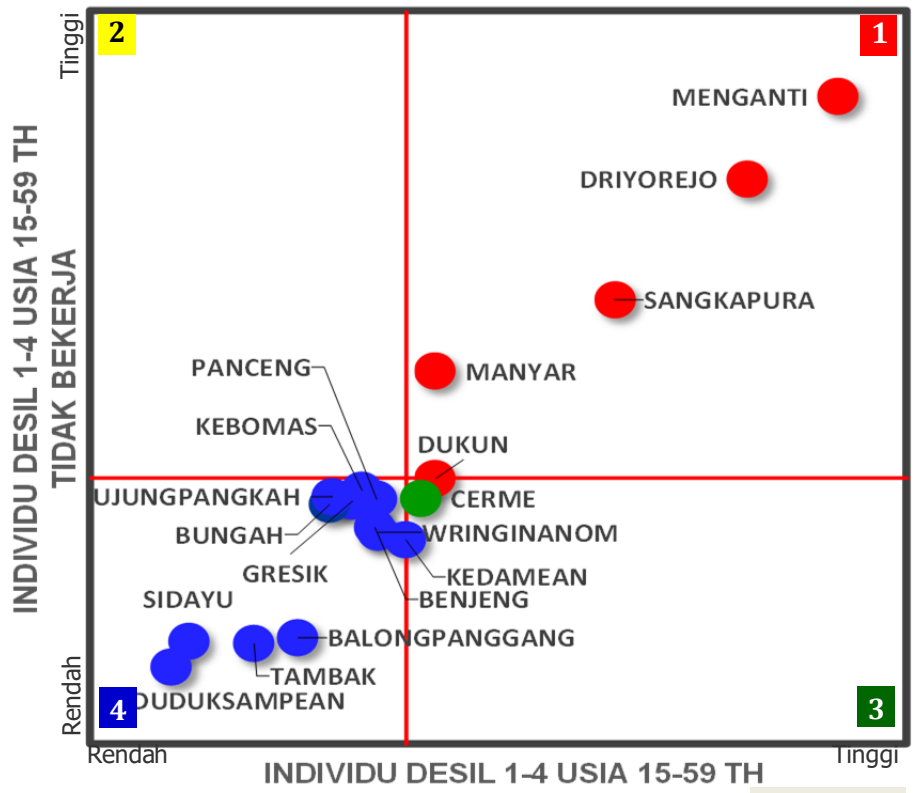

Sumber: *BPS dan P3KE Kab. Gresik – data di olah*

Berdasarkan gambar di atas, maka kecamatan Driyorejo, Dukun, Manyar, Menganti, dan kecamatan Sangkapura menjadi prioritas 1 untuk memperoleh intervensi program-program penanggulangan

kemiskinan dalam rangka mengurangi jumlah individu miskin ekstrim desil 1-4 usia 15-59 tahun tidak bekerja.

- halaman ini sengaja dikosongkan -

Daftar Pustaka

Badan Pusat Statistik. 2011. Ensiklopedia Indikator Ekonomi dan Sosial. Jakarta: BPS.

Badan Pusat Statistik. 2024. Statistik Kesejahteraan Rakyat 2024. Jakarta: BPS.

Badan Pusat Statistik. 2025. Statistik Pendidikan 2024. Jakarta: BPS.

Badan Pusat Statistik. 2025. Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Provinsi di Indonesia, 2020 2024. Jakarta: BPS.

Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Gresik. 2021. Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021-2025. Gresik: Bappelitbangda Kabupaten Gresik.

Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Gresik. 2023. Rencana Aksi Tahunan Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Gresik Tahun 2024. Gresik: Bappelitbangda Kabupaten Gresik.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Gresik. 2024. Statistik Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Gresik 2024. Gresik: BPS Kabupaten Gresik.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Gresik. 2025. Kabupaten Gresik Dalam Angka 2025. Gresik: BPS Kabupaten Gresik.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Gresik. 2025. Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Gresik Menurut Lapangan Usaha 2020-2024. Gresik: BPS Kabupaten Gresik.

Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur. 2024. Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Jawa Timur 2024. Surabaya: BPS Provinsi Jawa Timur.

Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur. 2025. Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Menurut Lapangan Usaha 2020-2024. Surabaya: BPS Provinsi Jawa Timur.

Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur. 2025. Provinsi Jawa Timur Dalam Angka Tahun 2025; Surabaya: BPS Provinsi Jawa Timur.

Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur. 2025. Keadaan Angkatan Kerja Provinsi Jawa Timur, Agustus 2024; Surabaya: BPS Provinsi Jawa Timur.

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional / Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. 2010. Buku III – Alat Analisis Tepat Guna untuk Perencanaan dan Penganggaran yang Berpihak pada Masyarakat Miskin. Jakarta: Bappenas.

Pemerintah Kabupaten Gresik. 2021. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026. Gresik.

Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K). 2010. Panduan Praktis Analisis Data Untuk Mendukung Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan. Jakarta: TNP2K.

------ Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2020.

------, https://www.bps.go.id/

------, https://www.jatim.bps.go.id/

------, http://www.kemdikbud.go.id

------, http://www.kemkes.go.id

------, https://p3ke.kemenkopmk.go.id/sebaran

------, https://www.Gresikkab.bps.go.id/

❑❑❑

Lampiran 1: Garis Kemiskinan, Jumlah Penduduk Miskin, Persentase Penduduk Miskin, Indeks Kedalaman Kemiskinan, Indeks Keparahan Kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur, Tahun 2023.

Kabupaten / Kota	Garis Kemiskinan (Rp/Kap/Bln)	Penduduk Miskin		P1	P2
		Jumlah (jiwa)	Persentase		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Kabupaten:					
01. Pacitan	352.606	76.200	13,65	1,73	0,32
02. Ponorogo	395.069	83.710	9,53	1,12	0,20
03. Trenggalek	411.527	74.580	10,63	1,26	0,21
04. Tulungagung	423.875	68.810	6,53	0,94	0,17
05. Blitar	387.733	101.940	8,69	1,21	0,23
06. Kediri	385.874	171.180	10,72	1,52	0,34
07. Malang	399.647	251.360	9,45	0,98	0,17
08. Lumajang	386.995	93.820	8,93	1,41	0,30
09. Jember	441.171	236.460	9,51	1,17	0,22
10. Banyuwangi	448.928	119.520	7,34	0,89	0,17
11. Bondowoso	494.000	105.130	13,34	2,06	0,51
12. Situbondo	396.587	82.620	11,90	1,59	0,30
13. Probolinggo	514.274	205.020	17,19	2,87	0,70
14. Pasuruan	429.624	154.090	9,24	1,22	0,26
15. Sidoarjo	571.696	119.150	5,00	0,71	0,16
16. Mojokerto	486.520	112.860	9,80	1,73	0,40
17. Jombang	488.754	117.360	9,15	1,15	0,24
18. Nganjuk	513.565	115.860	10,89	1,48	0,31
19. Madiun	437.296	75.870	11,04	1,47	0,31
20. Magetan	431.203	62.490	9,80	1,10	0,19
21. Ngawi	413.947	121.300	14,40	2,29	0,56
22. Bojonegoro	435.936	153.250	12,18	1,94	0,49
23. Tuban	454.336	177.250	14,91	1,95	0,42
24. Lamongan	481.969	149.940	12,42	1,73	0,38
25. Gresik	588.316	149.750	10,96	1,63	0,38
26. Bangkalan	503.207	196.660	19,35	3,25	0,82
27. Sampang	454.716	221.710	21,76	2,84	0,57
28. Pamekasan	431.127	126.430	13,85	1,48	0,24
29. Sumenep	471.860	206.100	18,70	4,50	1,42
Kota:					
71. Kediri	587723	21.030	7,15	1,08	0,23
72. Blitar	568280	10.610	7,30	0,81	0,12
73. Malang	674.660	37.780	4,26	0,76	0,18
74. Probolinggo	628.380	15.860	6,48	1,13	0,24
75. Pasuruan	529.512	13.560	6,60	1,26	0,33
76. Mojokerto	581.006	7.650	5,77	0,78	0,16
77. Madiun	605.131	8.460	4,74	0,65	0,16
78. Surabaya	718.370	136.370	4,65	0,71	0,16
79. Batu	613.985	7.100	3,31	0,35	0,06
Provinsi Jawa Timur	488.437	4.188.810	10,35	1,63	0,37
Indonesia	525.050	25.898.550	9,36	1,53	0,38

Sumber: *BPS*

Lampiran 2: Garis Kemiskinan, Jumlah Penduduk Miskin, Persentase Penduduk Miskin, Indeks Kedalaman Kemiskinan, Indeks Keparahan Kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur, Tahun 2024.

Kabupaten / Kota	Garis Kemiskinan (Rp/Kap/Bln)	Penduduk Miskin		P1	P2
		Jumlah (jiwa)	Persentase		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Kabupaten:					
01. Pacitan	370.643	73.030	13,08	1,49	0,25
02. Ponorogo	413.619	80.050	9,11	1,02	0,17
03. Trenggalek	434.146	73.750	10,50	1,43	0,28
04. Tulungagung	447.793	66.420	6,28	0,60	0,10
05. Blitar	408.399	95.910	8,16	0,80	0,12
06. Kediri	403.621	159.270	9,95	1,22	0,24
07. Malang	420.334	240.130	8,98	0,98	0,16
08. Lumajang	405.136	91.050	8,65	1,23	0,26
09. Jember	459.043	224.770	9,01	1,01	0,18
10. Banyuwangi	470.713	106.610	6,54	0,44	0,06
11. Bondowoso	517.741	99.620	12,60	1,51	0,28
12. Situbondo	413.611	80.170	11,51	1,19	0,18
13. Probolinggo	537.724	197.110	16,45	2,63	0,60
14. Pasuruan	450.088	144.840	8,63	1,09	0,21
15. Sidoarjo	597.284	109.390	4,53	0,64	0,18
16. Mojokerto	508.618	108.720	9,37	1,01	0,19
17. Jombang	514.170	110.570	8,60	0,90	0,17
18. Nganjuk	539.714	108.370	10,17	1,04	0,18
19. Madiun	460.205	73.150	10,63	1,40	0,25
20. Magetan	455.119	59.510	9,32	1,09	0,20
21. Ngawi	445.865	116.470	13,81	2,22	0,61
22. Bojonegoro	471.457	147.330	11,69	1,99	0,48
23. Tuban	488.131	171.240	14,36	1,95	0,39
24. Lamongan	524.636	146.980	12,16	1,88	0,44
25. Gresik	608.828	142.380	10,32	1,58	0,33
26. Bangkalan	547.017	190.940	18,66	2,03	0,39
27. Sampang	491.753	214.320	20,83	2,86	0,57
28. Pamekasan	467.493	123.460	13,41	1,05	0,14
29. Sumenep	506.569	196.420	17,78	4,19	1,53
Kota:					
71. Kediri	621.051	19.230	6,51	1,02	0,25
72. Blitar	596.105	9.860	6,75	1,06	0,24
73. Malang	706.341	34.840	3,91	0,42	0,08
74. Probolinggo	654.409	15.240	6,18	0,98	0,21
75. Pasuruan	554.195	13.070	6,32	0,70	0,12
76. Mojokerto	610.968	7.420	5,57	0,74	0,13
77. Madiun	637.838	7.840	4,38	0,56	0,09
78. Surabaya	742.678	116.620	3,96	0,65	0,16
79. Batu	642.778	6.590	3,06	0,46	0,09
Provinsi Jawa Timur	536.122	3.982.690	9,79	1,48	0,31
Indonesia	595.242	25.219.200	9,03	1,46	0,35

Sumber: *BPS*